

**GOLONGAN PUTIH DALAM PEMILIHAN UMUM D INDONESIA**  
**PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum  
Tatanegara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum

Oleh:

**A.INDRAERAWATI**  
**NIM: 10200117009**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A.Indraerawati  
NIM : 10200117009  
Tempat/Tgl. Lahir : Enrekang, 27 November 1998  
Jur/Prodi/Konsentrasi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : BTN Pinang Permail Blok B2 Nomor 19.  
Judul : Golongan Putih dalam Pemilihan Umum di  
Indonesia Perspektif Siyasah Syar'iyah.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 30 Juli 2021

Penyusun,

A.INDRAERAWATI  
10200117009

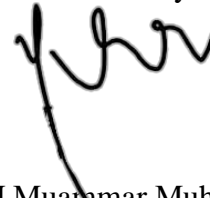
## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Golongan Putih dalam Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Siyasah Syar’iyyah” yang di susun oleh A.Indraerawati, NIM :10200117009 Mahasiswa prodi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Telah diuji dan dipertahankan dalam Munaqasyah dan dinyatakan telah dapat di terima sebagai salah satu syarat untuk meraih memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Syariah dan Hukum. Jurusan Hukum Tatanegara (dengan beberapa perbaikan)

Gowa 30 Juli 2021  
20 Zulhijah 1442 H

Ketua	: Dr.H.Muammar Muh.Bakry,Lc.,M.ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hj.Rahmatiah HL,M.Pd	(.....)
Munaqasy I	: Dr. Muhammad Sabir, M.Ag	(.....)
Munaqasy II	: Dr.Hj. Rahmatiah HL, M.Pd	(.....)
Pembimbing I	: Prof.Dr. Usman M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Hj. Rahmiati, M.Pd	(.....)

Di Sahkan Oleh:  
Dekan Fakultas Syariah Dan hukum



Dr.H.Muammar Muh.Bakry,Lc.,M.Ag  
NIP.19731122 200012 1 002

## KATA PENGANTAR



### *Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah rabbil Alamiin segala puji dan syukur kehadiran Allah swt., atas rahmat dan karunia-Nya skripsi yang merupakan persyaratan penyelesaian perkuliahan dapat penulis rampungkan sebagai langkah untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dikemudian hari. Doa sekaligus Ucapan maaf dan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan terkhusus kepada kedua orang tua saya “**ANDI SADDA** dan **HANISA**” yang tak henti hentinya memberi nasihat, dukungan, serta kerja kerasnya agar saya dapat menyelesaikan studi putrinya. Tentu ini semua tidak akan cukup dan tidak akan pernah cukup untuk membalas jasa kedua orang tua saya, saya juga memohon maaf yang sebesar besarnya kepada kedua orang tua saya jika selama perkuliahan saya banyak melakukan kesalahan yang membuat hati kedua orang tua saya terluka, saya sangat merasa bersalah dan tak hentinya memohon maaf yang sebesar besarnya

Ucapan Terima kasih juga penulis ucapkan kepada :

1. Bapak **Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

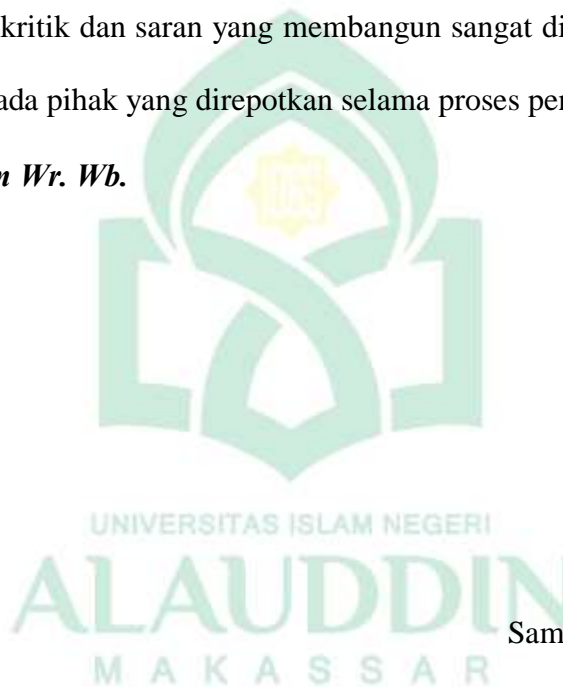
2. Bapak **Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag**, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Ibu **Dr. Hj. Rahmatiah HL, M.Pd** Wakil Dekan bidang Akademik dan pengembangan lembaga, Bapak **Dr. Marilang, SH.,M.Hum** selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, **Dr. H.M. Saleh Ridwan, M.Ag**, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Segenap Civitas Akademik Fakultas yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu **Dr. Kurniati, M.H.I** selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara serta Ibu **Dr. Hj. Rahmiati, M.Pd.** selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang selalu memberikan yang terbaik demi kemajuan jurusan.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang selama ini telah memberikan banyak ilmu sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dan bisa bermanfaat bagi saya dan banyak orang dikemudian hari.
5. Ayahanda **Prof. Dr. Usman., MA** dan Ibu **Dr. Hj. Rahmiati, M.Pd.** selaku Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, ilmu dan tenaga untuk membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Keluarga Besar Alauddin Debate Association (AlDebA) sahabat sekaligus keluarga yang telah memberikan penulis banyak sekali pengalaman dan ilmu selama menjabat sebagai sekretaris jendral AlDebA. Sekarang dan hari esok

AlDeba tetap ada ruang dihati saya.

7. Teman-teman kelas penulis Hukum Tata Negara kelas A yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi penulis dan memberikan penulis motivasi sehingga sampai kepada tahap ini.

Demikian, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya dan banyak orang dikemudian hari. Mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekeliruan dalam skripsi ini sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan. Saya juga memohon maaf kepada pihak yang direpotkan selama proses pengerjaan skripsi.

*Wassalamua'laikum Wr. Wb.*



Samata, 30 Juli 2021

Penyusun,

A.INDRAERAWATI

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metodologi Penelitian.....	13
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMILU DAN GOLPUT</b>	
A. Pengertian Pemilu (Pemilihan umum) di Indonesia.....	17
B. Eksistensi Golongan Putih.....	22
C. Partisipasi sebagai instrumen demokrasi.....	26
D. Wakalah (Pemilu) dalam Islam.....	31
<b>BAB II IMPLIKASI GOLONGAN PUTIH TERHADAP KEBERLANGSUNGAN DEMOKRASI</b>	
A. Urgensi Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum.....	35
B. Hak Pilih dalam Perspektif HAM.....	39
C. Golput jika dikaitkan dengan demokrasi.....	45
<b>BAB IV GOLPUT DALAM PEMILHAN UMUM DI INDONESIA</b>	
<b>PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH</b>	
A. Hubungan Agama dan Pemilu.....	54
B. Argumen Fiqh terkait Golongan Putih.....	57
C. Golput dalam Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Siyasa Syar'iyyah.....	69

## **BAB V (PENUTUP)**

A. Kesimpulan.....	75
B. Implikasi Penelitian.....	76
C. Riwayat Hidup.....	80

## **BAGIAN AKHIR**

### **Berisi Daftar Pustaka dan Lampiran-Lampiran**





## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	apostrof terbalik

غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda, apapun.

Jika ia terletak ditengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (’),

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I

اُ	<i>ḍammah</i>	U	U
----	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	<i>fathah an yā</i> ''	ai	a dan i
اوي	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ا...ا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā</i> ''	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā</i> ''	i	i dan garis di atas
اُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

#### 4. Tā' Marbūṭah

*Transliterasi* untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah* yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf konsonan ganda yang diberi tanda syaddah. Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ى), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi (i).

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

## 7. Hamzah

Aturan translasi huruf hamzah menjadi opostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif

## 8. Penulisan Kata Arab

Penulisan kata arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

## 9. Lafz al-Jalāl (هلا)

Kata “Allah” yang didahului partake huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah . Adapun *tā'* marbū'ahdi akhir kata yang disandarkan kepadalafz *al-Jalāl* ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat,

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).



## ABSTRAK

**NAMA : A.INDRAERAWATI**  
**NIM : 10200117009**  
**JUDUL SKRIPSI : GOLPUT ( GOLONGAN PUTIH) DALAM**  
**PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**

---

Penelitian ini berjudul “ Golput (Golongan Putih) dalam Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Siyasah Syar’iyyah”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimana argument fiqh terkait Golongan Putih, Bagaimana hubungan antara pemilu dan agama, Bagaimana Golongan jika dikaitkan dengan Demokrasi. Penelitian bertujuan : (1) Untuk mengetahui argumen fiqh terkait Golput (Golongan Putih) dalam pemilihan umum di Indonesia, (2) Untuk mengetahui hubungan antara Pemilu dan Agama, (3) Untuk mengetahui Golput (Golongan Putih) jika dikaitkan dengan demokrasi

Jenis Penelitian yang digunakan ialah penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan memperbanyak membaca referensi dan literatur guna menunjang dalam penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian Teologis Syar’i menganalisis metode ushul fiqh terkait Golput “Golongan Putih” dalam pemilihan umum di Indonesia”.

Hasil dari Penelitian menunjukkan bahwa hubungan pemilu dalam agama mempunyai keterkaitan yang sama. Sebab, keduanya memandang persoalan tersebut berkaitan dengan Hak manusia untuk memilih dalam pemilihan umum. Golongan putih sangat berimplikasi pada proses keberhasilan demokrasi karena dari golongan putih dapat diketahui tingkatan pemilih yang tidak setuju dengan pasangan calon yang ada. Dalam perspektif siyasah syar’iyyah Pemimpin yang wajib dipilih oleh Islam ialah pemimpin yang sesuai dengan tuntunan agama.

Adapun implikasi penelitian ini adalah mengurangi angka golongan putih dalam pemilihan umum. Memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya pemberian suara dalam pemilihan umum untuk kemaslahatan ummat.

**Kata Kunci : Golput, Fiqh, Partisipasi Pemilih, Siyasah Syar’iyyah.**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Manusia lahir untuk menjadi subyek hukum, maka otomatis ia akan menjadi penyandang hak dan kewajiban, salah satu hak yang ia peroleh adalah hak pilih dalam pemilihan umum.<sup>1</sup> Sebaliknya manusia pun mempunyai kewajiban hukum, ada kewajiban hukum yang langsung ditunjuk dalam rumusan peraturan dan ada kewajiban hukum yang hanya dapat disimpulkan dari adanya hak orang lain. Jika dalam suatu rumusan peraturan telah ditentukan adanya hak seseorang, maka sudah dianggap melekat dalam rumusan itu adanya kewajiban hukum pada orang lain

Salah satu bentuk nyata, dari demokrasi ialah keterlibatan masyarakat untuk terjun langsung untuk memberikan suaranya untuk memilih calon pemimpin, namun fakta empiris yang terjadi dilapangan justru banyak masyarakat yang enggan memberikan suaranya pada saat pemilihan, dengan dalih kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pasangan calon atau pun trauma dengan janji-janji politik. Ketidakpercayaan rakyat terhadap penguasa didasarkan pada banyaknya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Memilih partai politik tentu merupakan hak warga negara untuk menyalurkan aspirasinya dalam pemilihan umum. Karena sejatinya, keikutsertaan rakyat dalam pemilihan umum dan pilkada sangat menjadi penentu untuk pengambilan keputusan dalam menentukan wakil rakyatnya namun, persentase keterlibatan rakyat dalam politik pada setiap pemilihan terkadang terjadi depresiasi dan menciptakan kelompok sendiri yang acap kali sering disebut dengan istilah golput (golongan putih).

---

<sup>1</sup>R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), h.228.



Golongan putih berimplikasi pada proses keberhasilan demokrasi karena dengan adanya golongan putih, partisipasi masyarakat dan keseluruhan struktur pemilih dapat di deteksi sehingga, kadar partisipasi masyarakat dapat di ukur. Selain itu, dengan adanya golongan putih dapat diketahui berapa jumlah yang sepakat dengan calon yang akan dipilih dan yang tidak sehingga, mampu menyerap seluruh partisipasi masyarakat.

Dalam masyarakat ada beberapa kategori pemilih diantaranya, ada masyarakat yang sudah pasti pilihanya terhadap pasangan calon, adapula yang yang masih abu-abu dan belum menentukan kepada siapa ia memilih serta ada yang tidak sepakat dengan kandidat yang di sediakan. Maka dari itu, hak pilih di dasarkan atas kehendak individu baik memilih untuk dipilih ataupun memilih untuk tidak memilih. Kebebasan memilih bagi masyarakat sudah termaktub dalam konstitusi.

Secara historis, lahirnya golput (golongan putih) tidaklah lahir dari orang-orang yang tidak paham akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memberikan suaranya. Melainkan lahir dan dimotori oleh para intelektual yang motifnya untuk menghilangkan pemilu yang dipandang tidak sehat. Aksi ini dilakukan dengan cara tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum, bisa saja warga tetap datang kebilik TPS (Tempat Pemungutan Suara), namun bukan untuk memilih salah satu calon melainkan untuk memilih bagian putih pada kertas suara. Jika ditelaah putih dalam hal ini adalah lawan dari hitam yang acap kali dinotasikan sebagai eksistensi yang menyimpang. Dengan memilih pada bagian putih kertas suara tersebut maka artinya rakyat telah memilih mereka yang tidak menyimpang dari norma. Dan ada pula masyarakat yang benar enggan memberikan suaranya dengan tidak datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

Jika ditelaah salah satu alasan munculnya golongan putih di lingkungan masyarakat ialah kurangnya sosialisasi politik, pendidikan politik, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pasangan calon. Selain itu keterbatasan akses masyarakat terlebih yang tinggal jauh di daerah pedalaman sehingga tidak mampu menjangkau mengenai informasi pemilihan umum. Padahal ketika berbicara mengenai *dassolen* dalam landasan yuridis konstitusional pengaturan terkait hak pilih telah terjewantahkan pada bagian kedelean hak keterlibatan dalam bernegara dalam pasal 43 Ayat (1). Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa, “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, jujur, adil dan rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>1</sup>

Golongan Putih akan berdampak kepada kualitas pemilu serta meminimalisir keabsahan kontestan yang terpilih. Bagi pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT), dapat diminimalisir kesalahan-kesalahan pendataan dengan cara perbaikan sistem pendataan, sistem administrasi dan data kependudukan. Sedangkan bagi para pemilih yang golongan putih dengan alasan apatis terhadap pasangan calon, seperti pemilih yang tidak mengenal kandidat atau ideologis warga atau bahkan golongan putih karena memprotes rezim yang berkuasa dan tidak suka terhadap sistem yang diterapkan. Hal tersebut dapat dikurangi dengan upaya melakukan sosialisasi atau komunikasi politik kepada masyarakat, *stakeholder*, khususnya KPU, Partai Politik, dan kandidat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>2</sup> Andi Nur Mayapada dan Nila Sastrawati, Golput dan Kewajiban Memilih Pemimpin dalam Islam, *Siyasatuna: Jurnal Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2, Nomor 3, (September 2020), h. 4.

Dalam landasan yuridis konstitusional pengaturan terkait hak pilih telah terjewantahkan pada bagian kedelean hak keterlibatan dalam bernegara dalam pasal 43 Ayat (1). dalam pasal tersebut, menegaskan bahwa, “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, jujur, adil dan rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>3</sup> Pun ditegaskan pula dalam Ayat (2) bahwa, “Setiap warga negara berhak untuk turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara perwakilan yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Hak pilih yang merupakan bagian dari hak politik seseorang sudah didudukkan dalam pasal 23 Ayat (1) secara tegas mendalilkan bahwa, “setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.”<sup>4</sup> Jadi terkait persoalan hak pilih tidaklah boleh diintervensi oleh siapapun karena merupakan hak masing-masing individu untuk menentukan sikap apakah hendak memberikan suaranya atau tidak, karena sudah jelas diatur dalam konstitusi terkait kebebasan warga negara dalam pemberian hak pilihnya dalam kontestasi demokrasi.

Terdapat beberapa keterangan normatif yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits Nabi, sampai kepada hasil berpikir para ulama dalam ilmu Politik dan kaidah-kaidah fiqh dan ushul fiqh yang digunakan para ulama dalam melihat fenomena kepemimpinan. Indikator adanya pemimpin atau kepala negara ialah karena didunia ini harus ada yang mampu mengambil peran dalam tujuan melaksanakan tugas-tugas untuk mencapai kemaslahatan. Karena merupakan hal yang wajib untuk memilih

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nmor 39 Tahun 1999 Pasal 43Ayat (1) dan (2) Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>4</sup> Republik Indonesia Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 1999 Pasal 23 Ayat (1) Tentang Hak Asasi Manusia

pemimpin, setiap keputusan golongan putih tentunya harus dicermati kembali, perihal baik dan buruknya, Jika dicermati menggunakan neraca sudut pandang Islam dengan melihat persoalan kontemporer dari istilah golput (Golongan Putih) tentu menimbulkan persoalan perbedaan pendapat mengenai kebolehan, dan keharaman golongan putih. Berdasarkan penjelasan sebelumnya terkait persoalan golongan putih, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa dalam konstitusi telah menguraikan mengenai kebolehan golongan putih dengan dalih hak kebebasan warga negara dalam memilih berdasarkan keyakinannya. Karena golongan putih pun bagian dari hak asasi manusia namun pada tahun 2009, muncul fatwa dari MUI terkait golongan putih, yang menuai kontroversi, Oleh karenanya perihal golongan putih menjadi sangat menarik untuk diteliti dari sudut pandang siyasah syar'iyah dengan menelaah bagaimana persoalan golongan putih dengan melihat *illat* dari golongan putih, serta menyajiakan secara teoritik perspektif hak asasi manusia dalam menilai persoalan golongan putih dalam hal ini hak politik. Hal ini pula yang melatarbelakangi penulis sehingga mengangkat sebuah judul “Golongan Putih dalam Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Siyasah Syar'iyah.

### **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari uraian penjelasan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan pokok dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Golongan Putih dalam Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Siyasah Syar'iyah dan dari rumusan masalah pokok tersebut dapat ditarik submasalah :

1. Bagaimana argumen fiqh terkait Golput (Golongan Putih) dalam pemilihan umum di Indonesia?

2. Bagaimana hubungan antara Pemilu dan Agama?
3. Bagaimana Golput (Golongan Putih) jika dikaitkan dengan demokrasi ?

### ***C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian***

Salah satu tujuan adanya definisi operasional dan ruang lingkup penelitian ialah bertujuan untuk mendiskripsikan uraian atas kata atau *frase* yang dipilih sebagai judul dengan dalih untuk menghindari kesalahan persepsi bagi pembaca.<sup>5</sup>

#### **1. Golongan Putih**

Dalam pandangan khalayak umum Golput (Golongan Putih) ialah orang yang secara sengaja tidak memberikan suaranya dalam pemilihan umum.

#### **2. Pemilihan Umum**

Pemilihan umum ialah proses memilih seorang pemimpin untuk mewakili rakyat untuk mewakili rakyat dalam pengambilan keputusan sebagai konsuekensi negara yang menganut sistem demokrasi. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah menegaskan bahwasanya Pemilihan umum ialah sarana realisasi kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, jujur, adil dan rahasia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.<sup>6</sup>

#### **3. Siyasah Syar'iyah**

Dalam rangka penerapan syariah atau guna menjawab permasalahan yang muncul setelah Nabi Muhammad tiada yang belum ada ketentuannya secara tegas dan

---

<sup>5</sup>Rahmiati, *Terampil Menulis Karya Ilmiah* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h.146.

<sup>6</sup>Dedi Amrizal, Ahmad Hidayah Dalimunthe, dkk, *Penanggulangan Golput dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada* (Medan: Lembaga Penelitiandan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018), h. 8.

rinci didalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka ulama melakukan interpretasi atau para mujtahid melaksanakan *istinbat* dalam upaya menderviasi ini yang kemudian disebut *fiqh*. Ketika ulama melakukan penggalian terhadap ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw yang berkaitan dengan politik, negara dan pemerintah, seperti halnya persolan Golput (Golongan Putih) yang termasuk dalam persoalan kontemporer, maka hasil dari upaya itu disebut *fiqh siyasah*. Disebutkan sebelumnya bahwa *fiqh siyasah* disebut juga *siyasah syar'iyah*. Karena telah jelas bahwa *fiqh siyasah* itu didasari oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah atau dari syariah. Oleh karena itu, *siyasah* dalm konteks ini secara pasti memiliki relevansi dengan syariah, yang karenanya secara teoritik disebut *siyasah syar'iyah* yakni politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.<sup>7</sup>

#### **D. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini ialah “Golput (Golongan Putih) dalam Pemilihan Umum di Indonesia”. Oleh karenanya diperlukan beberapa referensi dan literature penunjang dalam penelitian ini diantaranya :

1. Dedi Amrizal, Ahmad Hidayah Dalimunthe, Yusriati dalam bukunya berjudul “Penanggulangan Golput dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif pada Bab I menguraikan mengenai gambaran tentang pemilihan umum, urgensi pemilihan umum. Pun juga membahas persoalan komisi pemilihan umum (KPU). Pada Bab II menguraikan mengenai golongan putih. Berbeda dengan penelitian ini, yang menguraikan persoalan bagaimana konsep *fiqh* dalam golongan putih, hubungan agama dan pemilu serta menganalisis persoalan golongan putih jika

---

<sup>7</sup> Ridwan, *Fiqh Politik* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019), h. 63.

dikaitkan dengan demokrasi.<sup>8</sup>

2. Ni'matul Huda, M. Imam Nasef dalam bukunya yang berjudul “Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia” secara umum membahas persoalan konsepsi demokrasi, konsepsi negara hukum modern, korelasi demokrasi dan negara hukum, demokrasi sebagai pilihan, pun juga menyinggung persoalan sistem pemerintahan, kepartaian dan pemilihan umum di Indonesia, berbeda dengan penelitian ini, menguraikan persoalan konsep *wakalah* dalam Islam eksistensi Golput..
3. Mohtar Hobidin dalam bukunya “Pemilu dan Partai Politik di Indonesia” pada Bab I membahas terkait pemilu dan Partai Politik, memahami *e-voting* dalam pemilu, pendidikan politik perempuan, perempuan dalam politik, sistem pemilihan legislatif. Berbeda dengan penelitian ini, yang memberikan gambaran persoalan golput, menguraikan persoalan golongan putih, memberikan gambaran dan teori-teori hak asasi manusia terutama yang berkaitan dengan hak politik.<sup>9</sup>
4. Miriam Budiarjo dalam bukunya “Dasar-Dasar Ilmu Politik” pada Bab I menguraikan secara umum konsep demokrasi, demokrasi konstitusional, menguraikan mengenai negara, membahas persoalan hak asasi manusia, menguraikan pula mengenai partai politik. Berbeda dengan penelitian ini yang menguraikan persoalan golongan putih, membahas mengenai pemilihan umum pun juga membahas persoalan golongan putih dalam perspektif siyasah

---

<sup>8</sup>Ni'matul Huda, M. Imam, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia* (PT Fajar Inter Pretama Mandiri, 2018) h.25.

<sup>9</sup> Muhtar Habboddin, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia* (Malang : UB Press, 2016) h. 3.



syar'iyah.<sup>10</sup>

5. Roso Prajoko dalam bukunya “Komunikasi Politik dan Perilaku Golongan Putih” secara umum menguraikan persoalan eksistensi golongan putih, memberikan gambaran mengenai proses komunikasi politik, fungsi komunikasi politik, tujuan komunikasi politik. Berbeda dengan penelitian ini, yang menguraikan persoalan eksistensi golongan putih, memberikan gambaran mengenai pemilu, persoalan hak asasi manusia, serta akan membahas mengenai partisipasi politik, dan bagaimana perspektif siyasah syar'iyah dalam memandang persoalan kontemporer yakni “Golput (Golongan Putih).<sup>11</sup>
6. Rahmatiah HL, dalam jurnalnya terkait “*Money Politic* dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa, menguraikan gambaran persoalan definisi *money politic*, partisipasi pemilu, sikap masyarakat terhadap *money politic* di Kabupaten Gowa serta faktor yang mempengaruhi sikap masyarakat terhadap *money politic* Tahun 2014 di Kabupaten Gowa.
7. Usman, dalam jurnalnya terkait, “Islam dan Politik (Telaah atas Pemikiran Politik Kontemporer di Indonesia)” menguraikan persoalan perbincangan antara Islam dan politik atau agama dan negara, pola pemisahan agama dan negara, menjelaskan mengenai agama dan negara berhubungan secara komplementer dan integralistik, dalam pengertian bersifat saling mengisi, dan saling melengkapi atau berada pada spektrum yang lebih dekat yakni adanya peluang bagi agama-agama untuk mengisi kehidupan bernegara, sehingga

---

8. <sup>10</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), h.

<sup>11</sup> Roso Prajoko, *Komunikasi Politik dan Perilaku Golput* (Jawa Tengah : Lakeisha, 2019), h.7.



rumusan negara Indonesia bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler, tetapi negara yang di dalamnya nilai-nilai agama bisa hidup dan ekisis.

8. Muhammad Sabir, Agus Muchsin dalam jurnalnya terkait “Urgensi fiqh Sahabat terhadap konstruksi metodologi hukum islam”, menguraikan persoalan bagaimana urgensi fiqh sahabat, prinsip-prinsip umum dalam mengambil sebuah ketetapan hukum (*al-istinbath al-hukum.*) Penyebab Ikhtilaf di Kalangan Sahabat, serta Karakteristik Pro Kontra Aliran Fikih, Lahirnya Mazhab-Mazhab Fiqih.
9. Megawati, Andi Tenri Padang, dalam jurnalnya “Peran Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula” menguraikan persoalan bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada Kabupaten Sinjai Tahun 2018 dan faktor yang memengaruhinya, Penguatan Kelembagaan yaitu memperkuat kelembagaan KPU sampai ketingkat paling bawah dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas PPK, PPS dan KPPS; Sosialisasi Politik, yaitu dengan menyiapkan pelbagai metode sosialisasi, seperti tatap muka (*face to face*), *Training Of Trainer*, dan Rumah Pintar Pemilu
10. Zulfadli dalam skripsinya yang berjudul “Golongan putih dalam memilih pemimpin menurut fatwa MUI Tahun 2009 dan UU No 39. Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” menguraikan pengertian golongan putih, sejarah golongan putih, serta golongan putih dalam perspektif Islam dan fatwa MUI Tahun 2009. Berbeda dengan penelitian ini, yang menguraikan *wakalah* dalam Islam, urgensi pemilih dalam pemilihan umum serta hubungan agama

dan pemilu

11. Nila Sastrawati dalam jurnalnya "Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S Coleman", menguraikan persoalan Keterlibatan masyarakat dalam politik. salah satu indikator ketercapaian asas demokrasi. Tiada demokrasi tanpa partisipasi politik warga, sebab partisipasi merupakan esensi dari demokrasi. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam berpolitik merupakan ukuran demokrasi suatu negara. Negara demokrasi menempatkan partisipasi politik rakyat sebagai salah satu kunci pokok keberhasilan negara.
12. Hasanuddin Muhammad, dalam jurnalnya terkait “Golput di Tinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan *Maslahah Mursalah*” menguraikan persoalan Hak partisipasi dalam politik, golput dalam perspektif Hukum dan HAM, *Maslahah Mursalah* terhadap Tindakan Golongan putih, berbeda dengan penelitian ini yang menguraikan persoalan implikasi golongan putih dalam keberlangsungan demokrasi serta membahas mengenai argumen *fiqh* terkait golongan putih.
13. M.Abdurrahman dalam jurnalnya terkait “Kontroversi Golput di Kalangan Ulama Persatuan Islam” menguraikan persoalan isu kepemimpinan di kalangan ulama persis, kepemimpinan perempuan, cara pemilihan presiden, kontroversi golongan putih pada pemilu berbeda dengan penelitian ini yang menguraikan persoalan golput dalam pandangan HAM, serta menganalisis golongan putih dalam perspektif *siyasah syar’iyyah*.
14. Elli Setiawati dalam skripsinya yang berjudul, “Analisis hukum Islam mengenai golongan putih dalam pemilihan daerah menurut perspektif majelis

ulama Indonesia Lampung” dalam landasan teori menguraikan persoalan pilkada, golput (golongan putih), sedangkan dalam metodologi penelitiannya golput dalam pilkada perspektif MUI Lampung, berbeda dengan penelitian ini menguraikan persoalan pemilu, partisipasi politik, eksistensi golongan putih, hubungan agama dan pemilu serta implikasi golongan putih terhadap keberlangsungan demokrasi.

15. H. Soebagio dalam jurnalnya yang berjudul “ Implikasi Golongan Putih dalam Perspektif Pembangunan Demokrasi di Indonesia” secara umum menguraikan mengenai perkembangan partisipasi politik pemilih dan golput dalam pemilu di Indonesia serta implikasi golongan putih dalam proses keberlangsungan demokrasi. Berbeda dengan penelitian ini menguraikan persoalan golongan putih perspektif *siyasah syar’iyyah*.
16. Kurniawan Anshar dalam skripsinya yang berjudul “Golput dalam Perspektif *Siyasah Syar’iyyah* (Studi Kasus Terhadap Prilaku Politik Masyarakat Kota Makassar” menguraikan persoalan Pengertian Golongan Putih, golongan putih dalam Pemilu menurut Undang-Undang, Sebab-Sebab Terjadinya golongan putih. Berbeda dengan penelitian ini yang menguraikan persoalan eksistensi golongan putih, golongan putih Perspektif HAM, hubungan agama dan pemilu, serta argumen *fiqh* Terkait golongan putih.
17. Nunuk Handayani dalam skripsinya yang berjudul “Fenomena Golput dalam Pemilihan Bupati Tuban Tahun 2006 dalam Perspektif Politik Islam”. Menguraikan persoalan eksistensi golput dalam pandangan politik islam berbeda dengan penelitian ini yang menguraikan persoalan *fiqh* dalam memandang golput (golongan putih), hubungan agama dan pemilu, persoalan

golput (golongan putih) jika dihubungkan dengan demokrasi.

18. Dian Hidayat dalam skripsinya yang berjudul “Fenomena kotak kosong dalam pemilihan Walikota Makassar Tahun 2018 perspektif siyasah syar’iyyah” dalam tinjauan teoritis menguraikan persoalan demokrasi, kontestasi pemilu dalam Islam, konsep *fiqh siyasah* dalam memandang kotak kosong. Berbeda dengan penelitian ini yang menguraikan persoalan pemilu, partisipasi politik, eksistensi golongan putih, pengaruh golongan putih dalam demokrasi konsep *fiqh* terkait golongan putih.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian, berisi penjelasan mengenai metode apa yang digunakan, pendekatan, teknik pengumpulan data, analisis dan sebagainya.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini berkaitan dengan Hukum Tata Negara yang menyinggung persoalan demokrasi dan Pemilihan Umum.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian digunakan sebagai dasar pijakan untuk menyusun sebuah argument dalam sebuah penelitian, adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Pendekatan Teologis Syar’i, yaitu pendekatan yang menggunakan neraca agama Islam dalam melihat eksistensi kebenaran tentang Tuhan melalui interpretasi dari Alquran dan hadist. Dalam pendekatan teologis syar’i dapat pula mempelajari dan menganalisis metode ushul fiqh dengan melihat ilat dari Golput “Golongan

Putih” dalam pemilihan umum di Indonesia” dengan mengangkat dan menganalogikan Al-Qur’an maupun Hadist. Selain itu pendekatan penelitian yang juga digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis undang-undang yang mengatur tentang hak pilih sebagaimana contoh dalam Undang-Undang Nomor 39. Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

### **3. Sumber Data**

Sumber data memiliki arti tempat dimana data itu diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :<sup>12</sup>

#### **a. Sumber data primer**

Sumber data primer adalah data utama yang diperoleh dan berkaitan langsung dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun sumber data primer adalah Al-Qura’an, Hadits, Kitab-Kitab dan buku-buku pemilu yang berkaitan langsung dengan penelitian.

#### **b. Sumber data sekunder**

Sumber data sekunder adalah data pelengkap sebagai pendukung referensi utama dalam penelitian, contohnya, jurnal, Koran ataupun makalah yang berkaitan dengan Golput (Golongan Putih).

### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data ialah proses mencari dan mengumpulkan data penelitian pendahuluan (*preliminary research*), terutama sumber data primer untuk menentukan permasalahan hukum yang berkaitan dengan Golput (Golongan Putih dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Karena bentuk penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) maka metode yang dilakukan adalah membaca dan

---

<sup>12</sup><http://sosiologis.com/data-primer-dan-data-sekunder> diakses pukul 12:00

memperbanyak analisis hukum Islam terkait golongan putih sebagai permasalahan kontemporer

## **5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

### **1. Teknik Pengolahan Data**

- a. Display data merupakan proses menampilkan data secara sederhana, dalam bentuk kata-kata atau kalimat, naratif dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan dikuasai oleh peneliti sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang tepat.
- b. Editing data yaitu proses memeriksa kembali data yang telah terkumpul untuk mengetahui apakah data yang terkumpul cukup baik dan dapat diolah dengan baik.

### **2. Teknik Analisis data**

Gorys Keraf berpendapat bahwa Analisis data adalah suatu proses atau cara untuk menguraikan, menerjemahkan data, mengolah data menjadi informasi agar karakteristik data tersebut mudah dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan terutama hal yang berkaitan dengan penelitian. Pada dasarnya analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan analisis deduktif sebagai prinsip utama dan metode induksi sebagai sistem penunjang kerja untuk memahami sebuah data. Analisis data terdiri dari :

#### **a. Analisis Tekstual**

Analisis Tekstual adalah memahami data dengan melihat aspek gramatikal sebuah konteks wacana

#### **b. Analisis Kontekstual**

Analisis Kontekstual dalam wacana dapat digunakan untuk memahami konteks. Konteks dalam wacana dibagi menjadi dua yaitu konteks bahasa dan konteks diluar bahasa. Konteks bahasa dengan internal wacana, sedangkan konteks luar bahasa disebut konteks situasi, konteks budaya atau konteks internal wacana.

## ***G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk memberikan pemahaman terkait argumen fiqh dalam Golput (Golongan Putih)
- b. Untuk mengetahui hubungan antara pemilu dan agama
- c. Untuk mengetahui Golput (Golongan Putih) serta kaitannya dengan demokrasi.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Pada tataran teoritis, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangsih dalam kajian Hukum Tata Negara melalui penerapan Hak Asasi Manusia dalam konstitusi, sehingga penafsiran pasal demi pasal didalamnya tidak hanya berpacu kepada penafsiran sesuai dengan kata atau kalimat pun melainkan juga maksud dan isi dari pasal dalam konstitusi. Dalam penelitian ini juga memberikan pemahaman dalam Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) dalam memandang persoalan Golput sebagai persoalan kontemporer.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Dalam penelitian ini, selain memiliki kegunaan teoritis pun juga mempunyai kegunaan praktis yaitu, memberikan pengedukasian kepada masyarakat terkait pentingnya kedudukan golput dalam sistem pemilihan di Indonesia



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**

#### ***A. Pemilihan Umum***

##### **1. Pengertian Pemilihan umum**

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi, sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat, guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu diharapkan dapat menjadi pemerintahan yang mendapat legitimasi kuat dan amanah. Pemilu pun menjadi tonggak tegaknya demokrasi dan rakyat secara langsung, terlibat aktif dalam menentukan arah serta kebijakan politik negara untuk lima tahun kedepan, sehingga diperlukan upaya dari seluruh komponen bangsa, untuk menjaga kualitas pemilu.<sup>1</sup>

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pun juga Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain. Jika ditelaah Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 1 ayat 1, Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Rahmatiah, HL “*Money Politic pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa*”, *Al-Daulah: Jurnal Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume.3, Nomor h.3.



Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup> Dalam penyelenggaraan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.<sup>3</sup>

Pemilihan umum memiliki banyak definisi dari berbagai ahli seperti Soedarson mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis. Penjelasan di atas menyebutkan bahwa pemilihan umum merupakan syarat minimal adanya demokrasi yang bertujuan memilih wakil-wakil rakyat, wakil daerah, serta presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam lembaga perwakilan. Kedaulatan rakyat atas penyelenggaraan pemerintahan dijalankan oleh presiden dan Kepala Daerah yang juga dipilih secara langsung.<sup>4</sup> Anggota legislatif maupun Presiden dan Kepala Daerah karena telah dipilih secara langsung, maka semuanya merupakan wakil-wakil rakyat yang menjalankan fungsi kekuasaan masing-masing. Kedudukan dan fungsi wakil rakyat dalam siklus ketatanegaraan yang begitu penting dan agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, maka wakil rakyat tersebut harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum.

Pendapat berbeda dari Ali Murtopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim pemilihan umum tidak

---

<sup>2</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 1 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>3</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 8 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>4</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 461.

lain adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat. Dan karenanya bagi suatu negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, pemilihan umum itu harus dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu. Ataupun seperti yang diungkapkan oleh Bagir Manan bahwasanya:

*“Pemilihan umum yang diadakan dalam siklus lima tahun sekali (5 tahun sekali) merupakan saat atau momentum memperlihatkan secara nyata dan langsung pemerintahan oleh rakyat. Pada saat pemilihan umum itulah semua calon yang ingin duduk sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan bergantung sepenuhnya pada kehendak rakyat”.*

### **1. Dasar Hukum Pemilhan Umum**

Penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu), serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, baik pemilihan umum maupun pemilihan walikota tetap berpedoman pada Undang-Undang. Untuk teknis pelaksanaannya lebih rinci diatur dalam aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berikut ini adalah undang-undang yang masih berlaku sebagai dasar penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656).

## 2. Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum

Sebagai wujud demokrasi, pemilihan umum berfungsi sebagai forum pengujian calon wakil rakyat atau pemimpin negara yang benar-benar memiliki kapasitas dan kemampuan bertindak atas nama rakyat. Selain sebagai wadah menyaring wakil rakyat atau pemimpin bangsa, pemilihan umum juga terkait dengan aturan hukum (*rechtstaat*), karena melalui pemilihan umum rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang berhak menciptakan produk hukum dan melakukan pengawasan atau melaksanakan undang-undang. kehendak rakyat digariskan oleh wakil-wakil rakyat. Dengan pemilihan umum, hak asasi manusia dapat dipisahkan, demikian juga hak atas persamaan di depan hukum dan pemerintahan.<sup>5</sup>

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum dalam Pasal 4 menegaskan bahwasanya, Pengaturan Penyelenggaraan Pemilihan umum bertujuan untuk :<sup>6</sup>

- a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;
- c. menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;
- d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilihan umum; mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien

Fungsi Pemilihan Umum Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil Fungsi Pemilihan Umum sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk :

- a. Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia.
- b. Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila

---

<sup>5</sup> Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), h. 221- 222.

<sup>6</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 4 Tentang Pemilihan Umum.

(Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).

- c. Menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945.

### ***3. Asas-Asas Pemilihan Umum***

Berbicara, mengenai sistem pemilu, tentunya tidak lepas dari asas pemilihan umum. Tolak ukur mengenai demokrasi dan tidaknya dapat dilihat dari bangunan dasarnya yang kokoh dan selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi. Asas ialah pondasi dasar yang diambil dari pola struktur dan kebudayaan masyarakat yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Mengenai asas pemilihan yang berlaku di Indonesia dapat dilihat dalam pasal 2 Undang-undang pemilu yaitu pemilihan umum harus diselenggarakan dengan langsung, umum, bebas, jujur, adil dan rahasia. Mengenai penjelasan dari masing-masing asas tersebut ialah sebagai berikut.

#### **1. Langsung**

Artinya bahwa pemilihan umum harus di selenggarakan secara langsung melalui perantara Komisi Pemilihan Umum (KPU) apabila masa kepemimpinan masing-masing walil rakyat sudah mencapai batasnya. Selain itu langsung dapat di artikan juga bahwa pada saat pemilihan tersebut berlangsung maka masyarakat langsung yang menentukan pilihanya tanpa adanya intervensi dari pihak manapun sesuai dengan kehendak dan hati nurani masyarakat.

#### **2. Umum**

Pemilihan umum harus di selenggarakan secara umum dengan melibatkan seluruh elemen-elemen masyarakat tanpa memandang suku ras agama dan lainnya.

#### **3. Bebas**

Berarti pemilihan tersebut di selenggarakan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun sehingga dengan system pemilihan bebas mampu menciptakan kondisi demokrasi sesuai dengan prinsip-prinsinya, hasil dari pemilihan itupun mampu menciptakan pemimpin dan wakil-wakil yang berkualitas yang sesuai dengan kehendak rakyat.

#### 4. Rahasia

Hal-hal yang mampu mengakibatkan konflik dalam masyarakat akibat di adakanya pemilihan maka dari itu penyelenggara pemilihan harus menyembunyikan identitas masing-masing pemilih guna menghindari adanya konflik dengan mengaca kepada sistem politik identitas apa tak lagi dalam negara Indonesia sangat kental dengan politik identitas golongan-golongan tertentu.

#### 5. Jujur

Bahwa prinsip pemilihan tersebut harus dilaksanakan secara jujur dan terbuka dan transparansi mengenai hasil pemilihan tanpa adanya penyimpangan yang terjadi selama proses penyelenggaraan pemilihan.

#### 6. Adil

Bahwa pemilihan tersebut harus berlangsung dengan adil tanpa memihak golongan manapun dan ras manapun sehingga mampu mencederai proses pemilihan yang terjadi.

### **B. Eksistensi Golput**

#### **1. Pengertian Golput**

Golput atau “golongan putih” adalah sebutan yang dialamatkan kepada orang yang tidak mau menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Atau sering pula

didefinisikan kepada sekelompok orang yang tidak mau memilih salah satu partai peserta pemilu. Intinya, golput adalah sebutan yang dialamatkan kepada sekelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu untuk menentukan pemimpinnya.<sup>7</sup> Golput itu merupakan golongan putih, artinya kertas itu tetap putih tidak ada coretan tidak ada coblosan artinya orang tidak memilih.<sup>8</sup>

Dalam literatur tentang perilaku memilih, penjelasan tentang abstain mengacu pada perilaku tidak memilih. Perilaku tidak memilih biasanya digunakan untuk merujuk pada fenomena seseorang tidak mengikuti pemilu karena kurangnya motivasi. Perilaku tanpa hak pilih tersebut biasanya digunakan oleh pemilih sebagai bentuk protes terhadap pemerintah, partai politik dan lembaga demokrasi lainnya.

## **2. Sejarah Golput di Indonesia**

Secara historis, di negara Indonesia golput sesungguhnya telah menjadi bagian dari dinamika politik semenjak pemilu nasional tahun 1955, dinamika saat itu kondisi politik yang cenderung mengarah pada terjadinya saling intimidasi antara Kaum Unitaris dan Kaum Federalis, telah menyeret masyarakat pada suasana yang serba dilematis, sehingga lebih baik memilih golput dari pada harus menjadi korban intimidasi dari lawan politik partai yang dipilih di sampan juga ketidaktahuan sebagian masyarakat tentang pemilu pada saat itu.<sup>9</sup>

Berbeda dengan situasi diatas, pada tahun 1970-an golput terjadi karena ada tekanan dari pihak oknum partai tertentu untuk memilih partai tersebut. Golput yang dicetus oleh antara lain tiga puluh empat eksponen yang dipimpin Arif Budiman,

---

<sup>7</sup> Badri Khairuman, dkk, *Islam dan Demokrasi Mengungkap Fenomena Golput*, (Jakarta: PT Nimas Multima, 2004), h. 69

<sup>8</sup> 23Muhammad Asfar, *Presiden Golput*, (Surabaya: Jawa Pos Press, 2004), h. 241-242.

<sup>9</sup> KH. Abdurrahman Wahid, Halim HD, dkk. *Mengapa Kami Memilih Golput* (Jakarta: Sagon, 2009), h. 98.

seorang aktivis mahasiswa, didampingi Julius Usman, Imam Waluyo, Marsilam Simanjuntak, Asmara Nababan, dan sejumlah aktivis lainnya pada tanggal 3 Juni 1971 bertempat di Balai Budaya, Jakarta. Menurut kelompok ini, dengan atau tanpa pemilu, kekuatan efektif yang banyak menentukan nasib negara ke depan adalah ABRI. Golongan putih bukan suatu pengelompokan politik, melainkan pengelompokan kultural, yaitu suatu gerakan moral yang bertujuan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia serta tradisi/kebudayaan dari suatu cara bermasyarakat golput lahir karena pemerintah dianggap telah melakukan tindakan tidak wajar terhadap para peserta pemilu yang lain, antara lain dengan memecah belah partai dan melakukan intimidasi terhadap rakyat.

Kebanyakan tokoh pencetus golongan putih dengan sebutan “Angkatan 66”, mereka ada yang menjadi anggota DPR, bahkan Menteri. Namun, ada pula yang tetap kritis melawan rezim baru yang dianggap mengingkari janji itu. Gerakan moral tersebut memprakarsai sikap untuk tidak memilih, langkah mereka didasari pada pandangan bahwa aturan main berdemokrasi tidak ditegakkan. Gerakan tersebut dilaksanakan satu bulan sebelum hari pemungutan suara pemilu pertama pada masa orde baru.<sup>10</sup>

Dari perkembangan di atas, negara berkembang seperti di Indonesia golongan putih lebih disebabkan oleh kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan hasil Pemilu yang kurang amanah dan memandang nilai-nilai demokrasi belum mampu mensejahterakan masyarakat.

#### **4. Macam-macam Golput**

Perilaku *nonvoting* adalah refleksi protes atau ketidakpuasan terhadap sistem

---

<sup>10</sup> Nunuk Handayani, *Fenomena Golput Dalam Pemilihan Bupati Tuban Tahun 2006 Dalam Perspektif Politik Islam*, h.1.



politik yang sedang berjalan.<sup>11</sup> Karena itu bentuk perilaku golput yang ditampilkan tidak seragam, melainkan beragam. Sekalipun demikian perilaku golput dalam pemilu diwujudkan secara umum dalam bentuk:

1. Memilih tidak hadir ke bilik suara. Sikap ini tidak lain merupakan bentuk protes yang paling nyata. Sikap apatis dan tak mau menggunakan hak pilihnya ini didasarkan pada empat hal, yaitu:
  - a. Sebagai reaksi terhadap pemerintah, anggota DPR dan partai politik yang tak mampu memperbaiki kehidupan ekonomi, sosial dan hukum. Berbagai kebijakan pemerintah telah jauh keluar dari Track demokrasi, yaitu mensejahterakan kehidupan rakyat.
  - b. Tidak adanya nilai lebih dari proses pemilu ini, sehingga mereka merasa merugi menghadiri pemilu baik secara tenaga, waktu, dan finansial. Nilai ini meliputi kualitas pemilu yang dengan masyarakat merasa nyaman dan yakin akan pemerintahan yang akan memimpin karena lahir dari proses jujur dan adil

Sedangkan menurut Novel Ali di Indonesia terdapat dua kelompok Golput:

- a. Kelompok golput awam, yaitu mereka yang tidak mempergunakan hak pilihnya bukan karena alasan politik, tetapi karena alasan ekonomi, pendidikan kesibukan dan sebagainya. Kemampuan politik kelompok ini tidak sampai ke tingkat analisis, melainkan hanya sampai tingkat deskriptif saja.
- b. Kelompok golput pilihan, yaitu mereka yang tidak bersedia menggunakan hak pilihnya dalam pemilu benar-benar karena alasan politik. Misalnya tidak puas dengan kualitas partai politik yang ada. Atau karena mereka menginginkan adanya satu organisasi politik lain yang belum ada dan berbagai alasan lainnya.

---

<sup>11</sup> Muhammad Asfar, *Presiden Golput*, h. 150.



Kemampuan analisis politik mereka jauh lebih tinggi dibandingkan golput awam. Golput pilihan ini memiliki kemampuan analisi politik yang tidak cuma berada pada tingkat deskripsi saja, tapi juga pada tingkat evaluasi.<sup>12</sup>

### ***C. Partisipasi sebagai Instrumen Demokrasi***

#### **1. Pengertian Partisipasi Politik**

Partisipasi menurut istilah berarti *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas politik. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa Inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik. Pun Miriam Budiarjo mendefinisikan partisipasi politik:

*“partisipasi politik merupakan aktivitas kelompok untuk secara aktif dan ikut serta dalam aktivitas kegiatan politik, yaitu dengan cara memilih untuk diwakilkan dalam kegiatan penentuan kebijakan. Semisal dalam hal pemberian suara dalam kontestasi pemilihan umum, ataupun ikut aktif dalam kegiatan penentuan kebijakan, mislanya dalam hal pemberian suara dalam kontestasi pemilihan umum ataupun ikut aktif dalam kegiatan partai politik”.*<sup>13</sup>

Partisipasi menurut Ramlan Surbakti, merupakan salah satu unsur krusial demokrasi demokrasi. Pemikiran yang menjadi dasar demokrasi dan juga partisipasi adalah suatu kondisi dimana seseorang melibatkan diri dalam penentuan kebijakan.<sup>14</sup>

Pendapat lain menegaskan terkait definisi dari partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, aktivitas masyarakat preman (*private*

<sup>12</sup> Novel Ali, *Peradaban Komunikasi Politik* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), h. 22

<sup>13</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h. 26.

<sup>14</sup> Ramlan surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010). h. 151.

*citizen*) untuk memberikan pengaruh dalam hal penentuan keputusan oleh eksekutif.<sup>15</sup> Yang mana dalam hal ini ada yang perlu di catat bahwa aspek penting yaitu, pertama Huntington dan Nelson mengartikan partisipasi politik hanyalah mencakup kepercayaan dan bukan tindakan. Walaupun mereka tidak mengkategorikan sikap dan perasaan berkaitan dengan suatu konsep tindakan politik. Kedua, yang di maksud dengan partisipasi politik adalah warga negara biasa yang tidak memiliki jabatan dalam pemerintahan atau seorang pakar profesional.

Berdasar pada perspektif politik dalam tataran historis pada pelaksanaan pemilu sebagai pesta demokrasi, berdasarkan pengalaman dapat dicermati dan diamati bagaimana perkembangan partisipasi politik maupun golput di Indonesia. Meningkatnya kesadaran keikutsertaan masyarakat di era pemilu Orde Baru kelompok golput seamata mata digerakkan secara paksa. Yang dimana dapat dikatakan sebagai keikutsertaan yang letakkan upaya mencari keselarasan dan suatu waktu dapat menimbulkan kelompok golput di dalam pemilu itu sendiri..

## ***2.Faktor-faktor Partisipasi Politik***

Ada dua hal yang dapat menjadi tolak ukur yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat diantaranya. Sudut pandang kepekaan politik terhadap pemerintah. Kesadaran politik ialah kepekaan dan kesadaran masyarakat terkait kewajiban dan hak yang ia emban semisal hak politik, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dan lain-lain.Terkait Aspek lainnya ialah kesadaran terhadap pelaksanaan kebijak pemerintah Kedua, menyangkut bagaimana penilaian dan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya. Pun juga ada hal yang akan mempengaruhi variable tersebut yaitu status dan kedudukan seseorang Selain itu ada

---

<sup>15</sup> Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson. *Partisipasi Politik Tidak Ada Pilihan Mudah*, (Jakarta: PT Sangkala Puser), h.4.

faktor yang berdiri sendiri (bukan variable independen).<sup>16</sup>

### **1. Bentuk Partisipasi Politik**

Partisipasi politik juga dapat ditinjau dapat dilihat dengan sudut pandang yang beraneka ragam. Dipandang sebagai suatu aktivitas politik. partisipasi politik dapat dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif mencakup kegiatan warga negara memberikan saran terkait kebijakan umum, menyarankan alternatif kebijakan yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, memberikan saran dan kritik untuk mengoreksi kebijakan pemerintah, taat pajak dan ikut serta dalam proses pemilihan perwakilan di pemerintahan. Sedangkan partisipasi pasif suatu kondisi dimana warga negara mentaati peraturan/pemerintah, menerima dan melaksanakan setiap keputusan pemerintahan

Kesadaran politik warga negara untuk ikut serta dalam aktivitas politik terdiri atas dalam berpartisipasi dalam politik terbagi menjadi empat tipe yaitu partisipasi aktif, partisipasi pasif tertekan (apatid), partisipasi militan radikal, dan partisipasi pasif.

Keikutsertaan secara aktif, jika masyarakat memahami kesadaran politik yang ia punya kepada pemerintah sangat tinggi. Pun sebaliknya jika kepercayaan masyarakat kepada pemerintah rendah maka partisipasi politik masyarakat disebut partisipasi pasif. memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi. terhadap pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif). Jika berbicara mengenai partisipasi masyarakat

---

<sup>16</sup> Rico Miranda Syaputra, "Golongan Putih (golput) di kota Palembang pada Pilpres Tahun 2019 (Analisis Faktor Penyebab Dan Strategi KPU Kota Palembang Dalam Mengurangi Angka Golongan Putih), (Palembang:UIN Raden Patah), h.15.

Adapun gambaran partisipasi politik yang dijelaskan oleh Rush dan Altoff dalam bentuk anak tangga atau secara tingkatan yakni :



Gambar 1. Tingkatan Partisipasi Politik dalam pandangan Rush and Altof

Jika ditinjau dari masyarakat yang berperan dan partisipasi politik maka dapat dibagi jenis partisipasi politik mulai dari partisipasi individual dan partisipasi kolektif itu sendiri yang dimaksud Partisipasi individual, ialah keikutsertan dalam kegiatan politik secara individual, seperti halnya demonstrasi atau menyuarakan pendapat yang dijalankan oleh kelompok orang secara massal sedangkan yang dimaksud

Partisipasi kolektif, ialah aktivitas politik yang dijalankan oleh sekelompok orang semata mata untuk mempengaruhi penguasa. Didalam Partisipasi kolektif terbagi lagi menjadi dua yang pertama ada yang dinamakan keikutsertaan secara konvensional dan nonkonvensional. Keikutsertaan secara konvensional misalnya dalam hal pemberian suara dalam pemilu diskusi ataupun musyawarah sedangkan yang di maksud kesadaran non konvensional ialah demonstrasi untuk menghentikan pemerintah yang berkuasa dikarenakan pemerintah tidak lagi menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat.<sup>17</sup>

## **2. Partisipasi sebagai Instrumen Demokrasi**

Keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum, merupakan suatu perwujudan dari instrumen demokrasi. Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwasanya demokrasi hadir sebagai harapan terlaksananya kedaulatan rakyat dalam wujud pemilihan umum. Oleh karenanya, proses dari pemilihan umum yang kemudian akan menjadi acuan apakah sebuah negara berhasil dalam melaksanakan sistem demokrasi di negaranya.

Prinsip demokrasi terutama dalam negara hukum selalu di kaitkan dengan prinsip kesetaraan maka dari itu penjaminan hak-hak dari setiap individu merupakan corong utama terciptanya system demokrasi yang sempurna. Menurut Nurcholis madjid menyatakan bahwa demokrasi termasuk dalam ideologi sebab nilai-nilai yang ada demokrasi selaras dengan ajaran-ajaran islam dengan permainan politik secara terbuka.<sup>18</sup>

Pada kasus Golongan putih sendiri ketika masyarakat enggan untuk

---

<sup>17</sup> Tajuddin, "*partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah*," (Tangerang: UNPAM,) Vol 3 Maret 2016.h. 8.

<sup>18</sup> Usman. "*Islam dan Politik (Telaah atas Pemikiran Politik Kontemporer di Indonesia)*," (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), Vol. 6, No.1 h. 8.

berpartisipasi dalam memberikan suaranya dalam hal penentu kebijakan entah disebabkan faktor kepentingan politik, kurangnya sosialisasi atau masalah pendidikan politik yang kurang. Maka tugas pemerintah dalam hal ini penyelenggara pemilihan umum mampu merancang program yang memahami masyarakat akan pentingnya partisipasi politik.

Di dalam negara demokrasi tentunya menjadi hal yang penting partisipasi masyarakat dalam hal politik baik mengisi jabatan politik atau pun dalam kegiatan pemberian suara. Keikutsertaan masyarakat tersebutlah akan menentukan sejauh mana demokrasi dapat berjalan.

#### **D. Wakalah dalam Islam**

##### **1. Pengertian Wakalah**

Wakalah berasal dari *wazan wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan *wakalah* adalah pekerjaan wakil.<sup>19</sup> Al-Wakalah juga berarti penyerahan (*al Tafwidh*) dan pemeliharaan (*al-Hifdh*).<sup>20</sup> Menurut kalangan Syafi'iyah arti *wakalah* adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (*an-naqbalu anniyabah*) dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.<sup>21</sup> Jadi dapat diartikan sistem wakalah dalam hukum Islam sesuai dengan prinsip dan maksud pemilihan umum dengan melakukan penyerahan kekuasaan oleh rakyat yang dianggapnya cakap dan sesuai dengan pilihannya yang

<sup>19</sup> Tim Kashiko, Kamus Arab-Indonesia, Kashiko, 2000, h. 693.

<sup>20</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Gema Insan: Jakarta, 2008,) h. 120-121.

<sup>21</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 20.

kemudian akan melaksanakan kekuasaan dari rakyat untuk mewakili rakyat dalam upaya penyelenggaraan negara.

Dalam pandangan hukum Islam, Pemilu merupakan cara untuk memilih wakil rakyat dan merupakan salah satu bentuk akad perwakilan (*wakalah*). Hukum asal *wakalah* adalah mubah (boleh), dalilnya terdapat hadits shahih penuturan Jabir bin Abdillah r.a yang berkata,

### 3. *Landasan Hukum Wakalah*

Landasan hukum *wakalah* adalah sebagai berikut:

Salah satu dasar dibolehkannya *wakalah* adalah firman Allah SWT yang berkenaan dengan kisah Ash-habul Kahfi.

#### a. Al-Qur'an

Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S Al-Kahfi:19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۚ

Terjemahan :

“ Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan



*hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun. (Q.S Alkahfi:19).*<sup>22</sup>

#### Sunnah

Dalam pandangan hukum Islam, Pemilu merupakan cara untuk memilih wakil rakyat dan merupakan salah satu bentuk akad perwakilan (*wakalah*). Hukum asal wakalah adalah mubah (boleh), dalilnya terdapat hadits shahih penuturan Jabir bin Abdillah r.a yang berkata:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي بِخَيْبَرَ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا» (رواه أبو داود و صححه)

Terjemahan : “*Aku pernah hendak berangkat ke khaibar. Lalu aku menemui Nabi Saw. Beliau kemudian bersabda: Jika engkau menemui wakilku dikhaibar, ambillah olehmu darinya lima belas wasaq.*”<sup>23</sup>

Prinsip ini menandakan bahwa seseorang tidak akan mampu untuk menjadi wakil atau pemimpin rakyat (khalifah) kalau bukan atas kehendak rakyat. Maka dari itu, letak dari pada pemilusebagai fasilitator untuk memilih khalifah yang sesuai dengan kehendak rakyat atau umat.<sup>24</sup>

Dalam sejarah Islam dijelaskan bahwa sistem pemilihan sudah ada sejak al-khulafah Ar-Rasyidin. Tetapi pada saat itu belum bakukan mengenai sistem pemilu yang digunakan untuk pengangkatan khalifah atau kepala negara. Dalam sejarah

<sup>22</sup> Al-Qur'an Surat Al-Kahfi ayat 19, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, Al-Quran dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2012, h. 411.

<sup>23</sup>J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa: Agama, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h.72

<sup>24</sup><https://www.hadits.id/hadits/dawud/3148>, dari penjelasan tentang al-Wakalah, diakses 20 April 2021.



Islam dijelaskan bahwa proses pengangkatan khalifah dengan sistem. Pertama, pengangkatan khalifah dilakukan dengan jalan musyawarah melalui pertemuan dalam suatu majelis secara terbuka. Kedua proses pengangkatan khalifah dilakukan oleh para pendahulunya yang dilakukan secara sepihak dengan melakukan penunjukan langsung.

#### c. Ijma

Ijma dapat diartikan sebagai kesepakatan antara para ulama, mengenai pandangan ataupun kesepakatan para ulama mengenai wakalah, mereka menyepakati wakalah dengan merumuskan bahwasanya, wakalah itu termasuk kedalam jenis ta'awun ataupun tolong menolong dengan dalih kebaikan dan kekuasaan kepada Allah swt.<sup>25</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Wakalah

#### 1. *al-Muwakkil* berarti orang yang memberi kuasa

Mengenai syarat-syarat *Al-muwakkil* berarti orang yang mewakilkan atau memberi kuasa dan disyaratkan untuk melaksanakan apa yang di wakikan dan mempunyai legitimasi keabsahan dari orang yang mewakilkan baik secara langsung ataupun tidak langsung sebab pemilik hak berada pada kekuasaannya. Adapun syarat-syarat muwakkil adalah:

- a. perwakilan dapat bertindak secara sah terhadap sesuatu yang di
- b. orang mukallaf atau mumayyiz tetapi berada dalam batas-batas tertentu, yakni mengenai kebermanfaatannya seperti di wakikan untuk menerima hibah serta menerima sedekah dan sebagainya.

#### 2. *al-Wakil* berarti orang yang di beri kuasa

---

<sup>25</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, h.125.

3. *al-Taukil* berarti harus ada hal yang di kuasakan
4. *Ijab dan Qabul* berarti ada pernyataan yang menandakan ijab qabul atau kesepakatan.<sup>26</sup>



---

<sup>26</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah; Suatu Pengenalan Umum*, Tazkia Institue, Jakarta, 1999, hlm. 101

### **BAB III**

#### **Implikasi Golput Terhadap Keberlangsungan Demokrasi**

##### ***A. Urgensi Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum***

Tolak ukur keberhasilan demokrasi oleh sebuah negara, ialah adanya keikutsertaan masyarakat dalam kontestasi pemilihan umum, baik berperan sebagai pemilih ataupun berperan sebagai orang yang memilih. Karena sejatinya partisipasi politik rakyat (pemilih) adalah hal yang sangat berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon. Sebagai bagian dari instrumen demokrasi pemilihan umum merupakan pilar demokrasi sebagai bentuk cerminan kekuasaan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis, yang akan memperoleh kepercayaan dan dukungan rakyat.<sup>1</sup>

Konsep *civil society* menyatakan bahwa demokrasi merupakan syarat tercapainya kebebasan untuk mencapai hak-hak politik rakyat. Menanggapi hal tersebut Header Nashir mengemukakan bahwa keadaan demokrasi diyakini sebagai sistem politik merupakan langkah solutif dalam menutupi berbagai kekurangan yang dimiliki oleh sistem timokrasi, aristokrasi, oligarki, dan tirani.<sup>2</sup>

Yusuf al Qadrawi menegaskan bahwa Keikutsertaan masyarakat dalam pandangan Islam, sejatinya partisipasi politik dibutuhkan semata mata untuk menjalankan syariat masyarakat, baik berupa permasalahan hukum, maupun aqidah

---

<sup>1</sup> Rahmatiah, HL, *Money Politic* pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa, *Jurnal Al-Daulah: Jurnal Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 3, Nomor 2, (Desember 2014), h. 1..

<sup>2</sup> Kurniati, Sistem Politik Demokrasi dalam Bias Hegemoni Negara, *Al-Daulah: Jurnal Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 7, Nomor 2, (2 Desember 2018), h.1.

secara kolektif untuk kemaslahatan ummat.<sup>3</sup>

Miriam Budiarjo, menguraikan definisi partisipasi politik ialah aktivitas masyarakat yang aktif dalam aktivitas politik melalui cara memilih seorang pemimpin baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan berdampak kepada kebijakan pemerintah.<sup>4</sup>

Dalam negara demokrasi partisipasi politik sebagai neraca dalam pengimplementasian penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi oleh rakyat yang sah. Dapat diketahui dengan melihat seberapa besar pengaruh atau keterlibatan rakyat dalam pemilihan umum. Jika ditinjau dari partisipasi rakyat dalam pemilihan, dapat diketahui bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dalam pemilu maka sebanyak itu pula yang memahami mengenai situasi dan keadaan politik kenegaraan. Begitupun dengan sebaliknya, semakin rendah keterlibatan masyarakat dalam pemilu maka ini menandakan bahwa apresiasi masyarakat terhadap masalah kenegaraan sangat minim dan enggan menaruh harapan dalam setiap kegiatan kenegaraan.<sup>5</sup> Hendaknya masyarakat berpartisipasi dalam mengelola kehidupan bersama masyarakat tanpa memandang gender sebab keduanya mempunyai hak untuk mengatur dan mengelola kepentingan umum. Termasuk di dalamnya *ya'muruna bi alma 'ruf wa yanhawna 'an al-munkar* (menyuruh pada kebaikan dan mencegah kemungkaran).<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Yusuf Al Qhardawi, yang dikutip oleh Nila Sastrawati Membumikan Syariat Islam, Dunia Ilmu *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Volume 19, Nomor 2, (2 November 2019), h.8.

<sup>4</sup> Miriam Budiarjo yang dikutip oleh Nila Sastrawati, Partisipasi Politik dalam Konsep Teori Pilihan Rasional James S Coleman, *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Volume 19, Nomor 2, (November 2019), h.4.

<sup>5</sup> Megawati, Andi Tenri Padang, Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi pemilu, *Siyasatuna: Jurnal Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2, Nomor 3, (Juli 2017), h.2

<sup>6</sup> Halimah Basri, Kepimpinana Politik Perempuan dalam Pemikiran Musaffir, *Al-Daulah: Jurnal Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 7, Nomor 1, (Juni 2018), h.8

Ciri sebuah negara demokratis adalah seberapa besar negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum. Sebab partisipasi politik masyarakat (pemilih) merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Tentu saja, dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi oleh masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Pun dalam Pemilihan umum misalnya, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada calon atau pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu.<sup>7</sup>

Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai evaluasi dan control masyarakat terhadap pemimpin atau pemerintahan. Oleh karena itu upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat harus didasarkan pada analisis dan argumentasi yang kuat. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan untuk mewujudkan langkah strategis dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan penyempurnaan sistem pemilu yang lebih baik kedepan. Itu artinya argumentasi dan analisis yang lahir mesti berbasis pada, pertama, metodologi atau kerangka pikir yang tepat untuk memahami dinamika partisipasi politik, sertakedua, didasari dengan kepekaan yang kuat terhadap dinamikadinamika yang berkembang dalam wilayah ekonomi, administrasi, politik, serta sosial dan kultural.

Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk perwujudan negara demkorasi.

---

<sup>7</sup>Tajuddin, *partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah*, (Tangerang: UNPAM,) Vol 3 Maret 2016, h. 12.

Negara tanpa partisipasi politik masyarakat cenderung otoriter dan sentralistik. Pengalaman politik pada saat orde baru memperlihatkan kesewenangan para pengambil keputusan politik dalam setiap perumusan kebijakan maupun perencanaan program. Akibatnya kebijakan atau yang diputuskan kerap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk pemberian diri baik dalam bentuk keikutsertaan, kehadiran, gagasan, keterlibatan dalam perumusan kebijakan dan pemberian diri dalam pengawasan manakala kebijakan itu hendak diimplementasikan. Menurut Conyers ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting, yaitu Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Dapat dirasakan bahwa merekapun mempunyai hak untuk turut memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan. Partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Umum juga sangat menentukan arah dan kemajuan suatu bangsa. Kualitas partisipasi politik akan sangat ditentukan apakah semua masyarakat yang telah memenuhi wajib pilih dapat memberikan suaranya, apakah masyarakat diberikan akses atau kemudahan dalam memilih serta apakah masyarakat dapat memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas yang didasarkan

pada keyakinan dan kepercayaan pada calon yang ia pilih. Permasalahan pemilu sesungguhnya bukan hanya sebatas karena proses teknisnya yang sering ditemui banyak pelanggaran tetapi permasalahan utamanya adalah hasil atau substansi dari pemilu masih jauh seperti yang diharapkan. Hasil akhir yang sesungguhnya diharapkan dari pemilu adalah melahirkan pemimpin yang ideal. Kenyataan selama ini bahwa selain proses pelaksanaan masih bersifat amatiran dan tidak profesional, anggota legislatif terpilih yang dihasilkan lewat proses pemilu masih dianggap punya kualitas rendah, mulai dari keterbatasan profesionalisme

### ***B. Hak Pilih dalam Perspektif Hak Asasi Manusia***

Hak Asasi Manusia Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia. Hak ini dimilikinya bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Meskipun manusia terlahir dalam kondisi dan keadaan yang berbeda-beda, berbeda jenis kelamin, ras, agama, suku, budaya dan keanekaragaman lainnya, tetap saja memiliki hak-hak tersebut dimana hak tersebut bersifat universal dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun dan kapanpun.<sup>8</sup>

Hal senada dikemukakan oleh Miriam Budiardjo bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki setiap manusia yang melekat atau inheren padanya karena dia adalah manusia. Hak ini merupakan hak yang paling mendasar (fundamental) agar manusia dapat berkembang sesuai dengan martabatnya. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bagian menimbang pada huruf b menyebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara

---

<sup>8</sup> Nunuk Handayani, *Fenomena Golput dalam Pemilihan Bupati Tuban Tahun 2006 Dalam Perspektif Politik Islam*, (Tesis: UIN Sunan Kalijaga, 2011) h. 13.

kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, 24 dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendeskripsikan pengertian hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>9</sup>

Hak asasi manusia merupakan hak yang secara kodrati melekat dalam diri manusia karena keberadaannya sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, meskipun manusia dilahirkan dalam keadaan dan kondisi yang beraneka ragam. Oleh karena itu, hak tersebut tidak boleh dicabut oleh kapanpun dan siapa pun.<sup>10</sup>

Hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai saling menghormati antar hak asasi masing-masing orang. Di dalam menerima suatu hak asasi, dalam hak itu disertai pembebanan yaitu kewajiban asasi untuk melindungi dan menghormati hak asasi orang lain.

Menurut Keterkaitan antara hak dan kewajiban sebagaimana yang termaktub dalam *Universal Declaration of Human Responsibilities* sebagai pelengkap *Declaration of Human Rights* PBB, adanya tanggungjawab atas kewajiban yang

---

<sup>9</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>10</sup> Ian Brownli, *Dokumen-Dokumen Mengenai Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1993), h.31-32.



mana ketika manusia mempunyai hak maka ia akan memiliki kewajiban. Naskah ini dirumuskan oleh suatu kelompok yang terdiri dari kira-kira 60 tokoh pemikir, dan mantan negarawan dari berbagai negara baik dari dunia Barat dan non-Barat, seperti Helmut Schmidt dari Jerman, Malcolm dari Australia, Jimmy Carter dari Amerika Serikat dan beberapa tokoh lainnya, dan kelompok ini menamakan dirinya *Interaction Council* pada tahun 1987 membahas pentingnya dirumuskan beberapa kewajiban yang dapat melengkapi Deklarasi HAM serta membantunya untuk menuju dunia yang lebih baik.

Laporan panitia kecil menekankan bahwa untuk mencari keseimbangan antara hak dan kewajiban perlu adanya “kaidah emas” (*Golden Rule*) hal ini mencakup beberapa sikap yaitu :

1. Jika kita mempunyai hak atas hidup, maka kita mempunyai kewajiban menghormati hidup itu
2. Jika kita mempunyai hak atas kebebasan, maka kita mempunyai kewajiban menghormati kebebasan orang lain
3. Jika kita mempunyai hak atas keamanan, maka kita juga mempunyai kewajiban menciptakan kondisi bagi semua orang, untuk menikmati keamanan kemanusiaan.
4. Jika kita mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam proses politik di negara sendiri dan memilih pemimpin-pemimpin kita, maka kita mempunyai kewajiban berpartisipasi dan berusaha agar pemimpin-pemimpin yang terbaik memimpin.
5. Jika kita mempunyai hak bekerja dalam kondisi yang adil dan menguntungkan untuk memberikan taraf hidup yang layak bagi kita serta keluarga, maka kita

mempunyai kewajiban untuk bekerja dengan penuh kemampuan kita.

6. Jika kita mempunyai hak memperoleh pendidikan, maka kita mempunyai kewajiban untuk belajar penuh sesuai dengan kemampuan kita dan dimana mungkin membagi pengetahuan serta pengalaman kita dengan orang lain.
7. Jika kita mempunyai hak menikmati kekayaan alam, maka kita mempunyai kewajiban menghormati, memelihara, dan memulihkan bumi serta sumber-sumber alam lainnya.

Naskah Deklarasi Tanggung Jawab Manusia sendiri mencakup 19 pasal diantaranya :

Pasal 1 : Setiap orang mempunyai tanggungjawab untuk memperlakukan orang dengan cara manusiawi.

Pasal 9 : Semua orang yang berkecukupan mempunyai tanggungjawab untuk berusaha secara serius untuk mengatasi keadaan kurang pangan, dan ketidaksamaan

Pasal 11 : Semua milik dan kekayaan harus dipakai secara bertanggungjawab sesuai dengan keadilan dan untuk memajukan semua umat manusia.

Hak Politik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, harus menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disingkat DUHAM. DUHAM ini berisi pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang dijadikan sebagai acuan dalam penegakan dan penghormatan hak asasi manusia baik bagi anggota PBB sendiri maupun masyarakat yang berada di wilayah yurisdiksinya. Dalam perkembangannya, tanggal 16 Desember 1966, melalui resolusi 2200A (XXI) MU PBB mengesahkan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik bersama-sama dengan Protokol Opsional pada

Kovenan 28 tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik beserta Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1976 (Penjelasan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Indonesia sebagai negara hukum yang berusaha menjunjung penegakan dan penghormatan hak asasi manusia, telah meratifikasi Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Hal ini disertai konsekuensi bahwa Pemerintah Indonesia memiliki tanggungjawab untuk memenuhi pelaksanaan hak sipil dan politik setiap warganegara. Hak-hak politik yang diatur dalam Pasal 21 DUHAM diantaranya :

- a. Berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- b. Berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya;
- c. Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, dimana kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan setara, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara

#### 1. Hak Pilih dalam Pemilihan Umum

Hak warganegara untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum disebut sebagai hak pilih, yang terdiri dari hak pilih aktif (hak memilih) dan hak pilih pasif.<sup>11</sup>

- a. Hak memilih (hak pilih aktif) Hak memilih adalah hak warganegara untuk memilih wakilnya di dalam suatu pemilihan umum. Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum. Kedaulatan politik sebuah bangsa akan tampak dengan sendirinya di tangan rakyat pemilih melalui pemilihan umum.
- b. Hak dipilih (hak pilih pasif) Hak dipilih adalah hak warganegara untuk dipilih menjadi anggota sesuatu Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dalam suatu pemilihan umum. Kegiatan warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu memilih atau tidak memilih.

Jika ditelaah sudut pandang demokrasi keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum adalah bagian dari hak yang dijamin oleh konstitusi. Dikarenakan Hak Asasi Manusia ialah hak yang diperoleh karena ia manusia. karena sejatinya , Setiap manusia mendapatkan hak bukan dari hukum positif, melainkan dari harkat dan martabanya sebagai manusia.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Dyah Permata Budi Asri, "Pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap Hak untuk Memilih dan Tidak Memilih (Golput) dalam Pemilu 2009," dalam Jurnal Konstitusi, PK2P Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Volume.2, Nomor.1, Juni 2009, h. 17.

<sup>12</sup> Muhammad Ihsyan Syraif, Andi Safriani, Pemenuhan Hak Memilih Penyandang Disabilitas pada Pemilu di Indonesia, *Aldev: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 1, Nomor 3, (November 2019), h.2.

**Table: 1 Perbandingan Antara HAM dan Hak Warga negara**

<b>HAM</b>	<b>Hak Dasar</b>
<i>Mensenrechten</i> : Hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir .	<i>Grownrechten</i> : Hak yang diperoleh manusia konsuekensinya sebagai warga negara.
Sumbernya : Tuhan	Sumbernya : Negara
Sifatnya : Universal	Sifatnya : Domestik
Peran Negara : Pengawal	Pengawal : Regulator/Pengatur

**Sumber: Perbandingan HAM dan Hak Dasar oleh Fadli Andi Natsir<sup>13</sup>**

Jika dilihat dari tabel diatas bahwa Hak Asasi Manusia dibagi menjadi dua bagian. Pertama, hak lahir yaitu hak yang bersumber dari tuhan yang sifatnya universal dan tidak diganggu oleh siapapun. Tugas negara dalam jenis hak ini hanya memberikan perlindungan dan pengawalan terhadap hak manusia. Hak tersebut diantaranya hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk kebebasan berpendapat. Kedua, hak yang bersumber dari manusia sebagai warga negara yang mempunyai peran dan tanggung negara dalam hak ini dengan melakukan pengaturan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa hak yang dapat dicabut oleh putusan pengadilan meliputi: Hak untuk menduduki jabatan tertentu, hak untuk bekerja pada angkatan bersenjata, hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dan hak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Jika disimpulkan menggunakan

<sup>13</sup> Fadli Andi Natsir, *Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia*, Al-Risalah: Jurnal Hukum Tatanegara Fakultas Syariaah dan Hukum, Volume 19, Nomor 1, (Mei 2019), h 5.

perspektif HAM. Golput adalah sebuah hak namun ketika golput berdampak kepada proses dari penyelenggaraan pemilu maka tindakan golput tersebut tidak dibenarkan.

### ***C. Golongan Putih jika dikaitkan dengan Demokrasi***

Keterlibatan masyarakat dalam politik merupakan salah satu indikator ketercapaian asas demokrasi. Tiada demokrasi tanpa partisipasi politik warga, sebab partisipasi merupakan esensi dari demokrasi. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam berpolitik merupakan ukuran demokrasi suatu negara. Negara demokrasi menempatkan partisipasi politik rakyat sebagai salah satu kunci pokok keberhasilan negara. Negara dengan tingkat partisipasi politik yang tinggi menunjukkan bahwa warga negara memahami pentingnya keterlibatan politik dengan bersedia melibatkan diri di dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Asumsi yang terbangun bahwa masyarakat yang lebih tahu apa yang dibutuhkan dalam kehidupan sosial dan bernegara.<sup>14</sup>

Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan suatu negara oleh rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari rakyat, berarti suatu negara terbentuk karena kekuasaan pemerintahan yang diberikan dari rakyat.<sup>15</sup> Unsur yang paling mendasar dalam negara adalah rakyat, karena semua gagasan berasal dari rakyat. Dan perlu diingat juga, dalam sistem demokrasi, pemerintah mendapatkan kekuasaan yang berasal dari rakyat. Oleh rakyat, artinya dalam penyelenggaraan negara, rakyat harus diikutsertakan. Karena rakyat telah memperoleh kekuasaan terbesar dalam kedudukannya di negaranya, maka rakyat harus bertanggung jawab atas segala fasilitas yang diberikan oleh pemerintah; Masyarakat harus ikut serta menjaga

---

<sup>14</sup> Mochtar Mas'ood, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 43.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta, Rajawali Pers 2004), cetakan ke lima h. 78.

ketertiban dan ketentraman masyarakat lain di tanah air. Bagi masyarakat, artinya segala ketertiban dan ketentraman yang dirintis masyarakat pada akhirnya akan menjadi anugerah bagi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, dalam membantu menjaga ketertiban, masyarakat harus ingat bahwa semua ini untuk masyarakat sendiri

Berdasarkan beberapa pengertian demokrasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan atau kedaulatan ada di tangan rakyat. Dengan kata lain, rakyat dapat dilibatkan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu dapat dipahami bahwa negara yang menganut sistem politik demokrasi senantiasa mengingat kehendak rakyat. Jadi semua tindakan dalam melakukan kekuasaan negara tidak bertentangan dengan kehendak dan kepentingan rakyat.<sup>16</sup>

Ada beberapa prinsip demokrasi yang penting, yaitu:

- a. Keterlibatan warga Negara dalam pembuatan keputusan politik
- b. Tingkat persamaan tertentu di antara warga Negara
- c. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga Negara.
- d. Suatu system perwakilan
- e. Suatu system pemilihan – kekuasaan mayoritas
- f. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi
- g. Pemilu yang bebas, jujur, dan adil (agar mendapat wakil rakyat yang sesuai aspirasi rakyat)
- h. Jaminan Hak Asasi Manusia

---

<sup>16</sup> Muladi, *Politik Kewarganegaraan: Landasan demokratisasi di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Erlangga. 2009), .h 59.

- i. Persamaan kedudukan di depan hukum
- j. Peradilan yang jujur dan tidak memihak untuk mencapai keadilan
- k. Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat
- l. Kebebasan pers

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu. Dalam tahapan demokrasi, golput adalah manifestasi politik, dimana rakyat tidak berpartisipasi politik (menggunakan hak pilihnya) secara sukarela dalam pemilihan umum sebagai pesta demokrasi.<sup>17</sup>

Karenanya menghadapi fenomena Golput yang terjadi lebih disebabkan oleh faktor kekecewaan publik terhadap kinerja partai politik dan pemerintah yang belum efektif, maka menjadi pembelajaran bagi partai politik dan pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya sebagai mesin kerja demokrasi yang efektif dan memiliki komitmen yang kuat, mewujudkan *good public governance*. Ketidakmampuan partai politik dan pemerintah menampilkan kinerja tersebut, maka fenomena Golput akan mengkristal menjadi faktor internal demokrasi yang potensial menimbulkan pembusukan demokrasi atau pembusukan politik (political decay), sehingga akan

---

<sup>17</sup> Miriam Budiarjo, *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi parlementer dan demokrasi Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1996 h.54.



berimplikasi melumpuhkan demokrasi, dimana partai politik sebagai mesin pembangkit partisipasi politik dalam demokrasi secara moral ikut bertanggungjawab.

Pemilu menjadi indikator yang paling mudah dalam menentukan sebuah negara demokratis atau tidak, karena sejatinya pemilu memberikan sebuah momentum kepada masyarakat untuk menentukan arah perkembangan sebuah negara. Pada pemilu masyarakat dapat memilih para wakilnya, dan menentukan siapa yang akan memimpin sebuah negara pada nantinya, untuk itu momentum pemilu juga membutuhkan sebuah pemaksimalan pelibatan masyarakat, tanpa adanya pelibatan masyarakat seperti maraknya golput (golongan putih) maka pemilu hanya akan menjadi instrumen formal dan indikator penilaian demokrasi saja, tanpa adanya substansi, sehingga antara golput dan demokrasi sangat berkolerasi dalam penentuan keberhasilan demokrasi baik dari segi instrumen formal maupun dari segi substansi. masyarakat yang aktif dalam aktivitas politik melalui cara memilih seorang pemimpin baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan berdampak kepada kebijakan pemerintah.<sup>18</sup>

Dalam negara demokrasi partisipasi politik sebagai neraca dalam pengimplementasian penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi oleh rakyat yang sah. Dapat diketahui dengan melihat seberapa besar pengaruh atau keterlibatan rakyat dalam pemilihan umum. Jika ditinjau dari partisipasi rakyat dalam pemilihan, dapat diketahui bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dalam pemilu maka sebanyak itu pula yang memahami mengenai situasi dan keadaan politik kenegaraan. Begitupun dengan sebaliknya, semakin rendah keterlibatan masyarakat

---

<sup>18</sup> Miriam Budiarto yang dikutip oleh Nila Sastrawati, Partisipasi Politik dalam Konsep Teori Pilihan Rasional James S Coleman, *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Volume 19, Nomor 2, (November 2019), h.4.

dalam pemilu maka ini menandakan bahwa apresiasi masyarakat terhadap masalah kenegaraan sangat minim dan enggan menaruh harapan dalam setiap kegiatan kenegaraan.<sup>19</sup> Hendaknya masyarakat berpartisipasi dalam mengelola kehidupan bersama masyarakat tanpa memandang gender sebab keduanya mempunyai hak untuk mengatur dan mengelola kepentingan umum. Termasuk di dalamnya *ya'muruna bi alma 'ruf wa yanhawna 'an al-munkar* (menyuruh pada kebaikan dan mencegah kemungkaran).<sup>20</sup>

Ciri sebuah negara demokratis adalah seberapa besar negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum. Sebab partisipasi politik masyarakat (pemilih) merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Tentu saja, dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi oleh masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Pun dalam Pemilihan umum misalnya, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada calon atau pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu.<sup>21</sup>

Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai evaluasi dan control masyarakat terhadap pemimpin atau pemerintahan. Oleh karena itu upaya

---

<sup>19</sup>Megawati, Andi Tenri Padang, Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi pemilu, *Siyasatuna: Jurnal Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2, Nomor 3, (Juli 2017), h.2

<sup>20</sup> Halimah Basri, Kepimpinana Politik Perempuan dalam Pemikiran Musaffir, *Al-Daulah: Jurnal Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 7, Nomor 1, (Juni 2018), h.8

<sup>21</sup>Tajuddin, *partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah*, (Tangerang: UNPAM,) Vol 3 Maret 2016, h. 12.

meningkatkan partisipasi politik masyarakat harus didasarkan pada analisis dan argumentasi yang kuat. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan untuk mewujudkan langkah strategis dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan penyempurnaan sistem pemilu yang lebih baik kedepan. Itu artinya argumentasi dan analisis yang lahir mesti berbasis pada, pertama, metodologi atau kerangka pikir yang tepat untuk memahami dinamika partisipasi politik, serta kedua, didasari dengan kepekaan yang kuat terhadap dinamika yang berkembang dalam wilayah ekonomi, administrasi, politik, serta sosial dan kultural.

Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk perwujudan negara demokrasi. Negara tanpa partisipasi politik masyarakat cenderung otoriter dan sentralistik. Pengalaman politik pada saat orde baru memperlihatkan kesewenangan para pengambil keputusan politik dalam setiap perumusan kebijakan maupun perencanaan program. Akibatnya kebijakan atau yang diputuskan kerap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk pemberian diri baik dalam bentuk keikutsertaan, kehadiran, gagasan, keterlibatan dalam perumusan kebijakan dan pemberian diri dalam pengawasan manakala kebijakan itu hendak diimplementasikan. Menurut Conyers ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting, yaitu Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk

proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Dapat dirasakan bahwa merekapun mempunyai hak untuk turut memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan. Partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Umum juga sangat menentukan arah dan kemajuan suatu bangsa. Kualitas partisipasi politik akan sangat ditentukan apakah semua masyarakat yang telah memenuhi wajib pilih dapat memberikan suaranya, apakah masyarakat diberikan akses atau kemudahan dalam memilih serta apakah masyarakat dapat memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas yang didasarkan pada keyakinan dan kepercayaan pada calon yang ia pilih. Permasalahan pemilu sesungguhnya bukan hanya sebatas karena proses teknisnya yang sering ditemui banyak pelanggaran tetapi permasalahan utamanya adalah hasil atau substansi dari pemilu masih jauh seperti yang diharapkan. Hasil akhir yang sesungguhnya diharapkan dari pemilu adalah melahirkan pemimpin yang ideal. Kenyataan selama ini bahwa selain proses pelaksanaan masih bersifat amatiran dan tidak profesional, anggota legislatif terpilih yang dihasilkan lewat proses pemilu masih dianggap punya kualitas rendah, mulai dari keterbatasan profesionalisme.

## BAB IV

### Golongan Putih dalam Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Siyasa

#### Syar'iyah

##### A. Hubungan Agama dan Pemilu

Pada hakikatnya Pemilihan umum dalam Islam disebut dengan istilah *Wakalah* dan pemilihan umum dalam Islam adalah salah satu instrumen dari demokrasi yang disebut dengan istilah *syura*.

Sebagaimana Allah berfirman dalam QS Asy-Syura/25:38.

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝

Terjemahan :

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”<sup>1</sup>

Pandangan hukum Islam bahwa pemilu merupakan sarana untuk menentukan wakil-wakil rakyat dan bisa dilakukan dengan sistem perwakilan dan hukum *wakalah* adalah *mubah* (boleh) sebagaimana dijelaskan dalam hadits shahih penuturan Jabir bin Abdillah r.a yang berkata:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ « صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي بِخَيْبَرَ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا » (رواه أبو داود و صححه)

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung; Gema Risalah Press, 2015), h.370.

Terjemahannya :

*“Aku pernah hendak berangkat ke khaibar. Lalu aku menemui Nabi Saw. Beliau kemudian bersabda: Jika engkau menemui wakilku dikhaibar, ambillah olehmu darinya lima belas wasaq.”*

Hubungan agama dan pemilihan umum saling berkaitan dimana agama mengakui adanya hak untuk menjadi pemimpin dan dalam agama istilah pemilihan umum disebut *wakalah* sedangkan pemilihan umum pun juga mengakui adanya hak pilih sebagai bentuk implementasi sarana pemenuhan hak masyarakat yang sesuai dengan landasan yuridis konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."<sup>2</sup> Hal ini menunjukkan bahwasanya dengan adanya pemilihan umum maka kedaulatan rakyat bisa direalisasikan.

Para ulama pun bersepakat bahwasanya *wakalah* atau pemilihan umum dalam Islam diperbolehkan, dan disunnahkan karena sejatinya *wakalah* bagian dari ta'awun atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan taqwa. Tolong menolong dalam Islam diserukan oleh Al-Qur'an dan di Sunnahkan oleh Rasulullah saw.

Sebagaimana Firman Allah swt dalam QS. Al-Maidah/2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan:

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.*<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Islamiyah Hasan, Ahkam Jayadi, Eksistensi Bawaslu dalam Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif DPRD Tahun 2019 dari Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, *Aldev: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2, Nomor 2, (Agustus 2020), h.3.

<sup>3</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jawa Timur: Halim Publishing, 2013), h. 106.

Untuk kesimpulannya penerapan hukum Islam di dalam sistem Pemilu menjadi suatu kewajiban untuk mendirikan sebuah negara yang menegakkan daulat islamaiah. Dan golongan putih tidak terlepas dari *fiqh al-Siyasah* tersebut dengan beberapa contoh kaidah fiqhiyah kulliyah yang menyebutkan :

”الواجب لا يترك الا لواجب“

Terjemahannya:

*Kewajiban tidak boleh ditinggalkan kecuali karena kewajiban lain.*

Adapun pengertian tersebut adalah apabila hukum Pemilu menjadi kewajiban maka golongan putih tidak boleh dilakukan Teks kaidah ini menggunakan pola kalimat yang berbentuk istisna' (pengecualian) yaitu kata 'لا' atas sesuatu yang dinafikan (lafat لا). Dalam kajian usul fikih, pola kalimat semacam ini mempunyai makna terbatas pada objek yang disebutkan (Hashr). Kesimpulan maknanya adalah kewajiban yang bisa ditinggalkan hanyalah terbatas dalam rangka beralih pada kewajiban lainnya. Bukan untuk melaksanakan aktifitas ibadah yang berstatus lain seperti sunah.<sup>4</sup>

Jika dilihat dari sistem demokrasi, sebagian ulama kontemporer dan intelektual Muslim mengatakan konsep demokrasi mempunyai persamaan dengan sistem syura dalam Islam, sistem demokrasi ini merupakan sistem pemerintahan mayoritas yang menerapkan metode permusyawaratan dalam pengambilan keputusan. Adapun sebagian yang lain membedakan dua konsep tersebut dengan berbagai dalil yang dikemukakan.<sup>5</sup>

Dengan penjelasan kedua konsep di atas, yaitu konsep *fiqh al-siyasah*

---

<sup>4</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, at-Taklil al-Hizbi, edisi Indonesia: terjemahan oleh, M. Shiddiqi, *Pembentukan Partai Politik Islam*, cet II, (Bogor: Pustaka Thariqul Izza, 2002), h.45.

<sup>5</sup> Sukran Kamil, *Islam & Demokrasi*, ( Jakarta: Gaya Media Pratam, 2002), h. 31.



terhadap hubungan Golput dengan Pemilu, Parpol dan sistem demokrasi, tidak bisa dipisahkan demi tercapainya tujuan *hifz al-ummah* sebagai *maqashid al-syariah* untuk menegakkan Negara. Maka apa yang terkait di dalam sistem pemerintahan di Indonesia seperti sistem pemilihan umum, demokrasi adalah alat untuk mendirikan sebuah Negara semata-mata untuk kemaslahatan.

### 1. Argumen Fiqh terkait Golput (Golongan Putih)

Salah satu ajaran Islam yang menempati posisi penting dan menjadi perhatian dalam pandangan umat Islam ialah hukum Islam, karena hukum Islam merupakan gambaran paling konkrit dari Islam sebagai sebuah agama. Di sinilah pentingnya hukum Islam maka mustahil bagi seseorang memahami agama Islam. tanpa hukum Islam. Apabila dilihat dari segi historisnya, hukum Islam diawali masa kenabian Nabi Muhammad Saw sebagai Rasul Allah Swt yang mempunyai tugas menyampaikan, menjelaskan wahyu (al-Qur'an) kepada umat manusia. Beliau tidak hanya sebagai rasul Allah tetapi juga sebagai kepala pemerintahan dan Qadhi. Ini merupakan masa awal pertumbuhan atau perkembangan fiqh Islam dalam arti proses munculnya hukum-hukum syariah. Itu disebabkan karena pembentukan suatu hukum tidak terlepas dari proses turunnya wahyu Allah sebagai sumber utama hukum Islam dan hadits sebagai sumber kedua hukum Islam.<sup>6</sup>

Pada masa Rasul, manakala muncul suatu persoalan hukum, baik yang berhubungan dengan Allah maupun kemasyarakatan, Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran untuk menjelaskannya. Rasul sebagai muballigh, menyampaikan penyampaian penjelasan ini kepada umatnya untuk di ikuti. Kendati demikian, penjelasan Al-Quran tersebut tidak selamanya tegas dan terperinci (*tafsili*), melainkan kebanyakan bersifat

---

<sup>6</sup>Muhammad Sabir, Muchsin Agus. "*Urgensi Fiqh Sahabat Terhadap Kontruksi Metodologi Hukum Islam,*" (Pare-Pare : IAIN Pare-Pare, 2019), Vol.12, No. 2.



garis besar (*ijmali*), sehingga di butuhkan lebih lanjut dari Rasul. Sebagai orang yang diberi wewenang menjelaskan di satu sisi dan menghadapi realitas sosial yang berkembang di sisi lain, Rasul terkadang harus menggunakan akal yang di sebut dengan *ijtihad* dalam penerapan hukum Islam.<sup>7</sup>

Seiring dinamika zaman yang berubah maka sumber diatas membutuhkan *Istinbath* dengan cara analisis (*ijtihad*) meskipun secara historis sudah ditutup yang kemudian ulama modernis untuk membukanya kembali dan dilakukan oleh ulama dunia (termasuk Indonesia) dengan berbagai pendekatan dan metode. Tujuan penemuan hukum haruslah dipahami oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Quran dan Hadits khususnya dalam segala cabang.

#### **a. Metode penetapan hukum Islam dengan Metode *istinbath* dan *Ijtihad***

Metode penetapan *istinbath* dapat dilakukan dengan tiga cara. Pertama, melihat aspek kebahasaan; kedua mengkaji *maqasid syariah* (tujuan hukum) dan ketiga, penyelesaian beberapa dalil yang secara lahiriah bertentangan. Para Mujtahidin dengan mempelajari Usul Fiqh dapat mengetahui dan mempraktekkan kaidah-kaidah cara mengeluarkan hukum dari dalilnya. Ulama ushul fiqh menetapkan bahwa untuk mengeluarkan hukum harus mengetahui Kaidah Syar'iyah dan Kaidah Lughawiyyah.

Kaidah Syar'iyah, adalah ketentuan umum yang ditempuh Syara' dalam

---

<sup>7</sup> Ratna Wijayanti, "*Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal Metode Istinbath dan Ijtihad dalam menetapkan Hukum Produk Halal*," (Jawa Tengah : Universitas Sains Al-Qur'an, 2018), Vol.20, No. 2.h.

menetapkan hukum dan tujuan penetapan hukum bagi subyek Hukum (Mukallaf). Adapun diantaranya adalah Istidlal. Prinsip dalam istidlal dalam menetapkan hukum ialah:

- a. Melihat pada Al Qur'an; Al Qur'an sebagai dasar pertama dalam istidlal. Dengan kata lain. Al Qur'an ialah sumber dari segala sumber Hukum Islam.
- b. Melihat pada As Sunnah; As Sunnah sebagai penjelas Al Qur'an di samping penetap hukum baru apabila dalam Al Qur'an tidak terdapat dasar hukum tersebut.
- c. melakukan Ijtihad dalam menggunakan atau memahami dalil; baik dalam Al Qur'an maupun As Sunnah, bila menghadapi dalil atau dalalah yang dhanniyah
- d. melakukan Ijtihad dalam menghadapi dua atau beberapa dalil yang kekuatannya sama atau dhahirnya bertentangan (ta'arudul adillah).

#### **b. Metode Penetapan hukum dengan Mashlahah Mursalah**

*Maslahah Mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu *mashlahah* dan *mursalah*. Kata “*maslahat*” yang secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. *Mashlahah* merupakan bentuk mashdar dari *fi'il shalaha*, ia merupakan lawan dari kata mafsadat yang berarti kerusakan dan kebinasaan. *Mashlahat* secara etimologi adalah kata mufrad dari *mashlahat* sama artinya dengan *al-shalah* yaitu mendatangkan kebaikan. Terkadang dipakai istilah lain yaitu istilah yang berarti mencari kebaikan

Dilihat dari segi segi prioritas penggunaannya, *mashlahat* di bagi menjadi kepada tiga macam, yaitu

1. *Mashlahah al-Dharuriyah*, yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemashlahatan seperti ini

ada lima, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan al-mashalih al-khamsah.

2. *Mashlahah al-Hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia atau dengan kata lain mashlahat yang dibutuhkan oleh orang dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya
3. *Mashlahah al-Tahsiniyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapai kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai amalan tambahan, dan berbagai cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan *al-dharuriyah* harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan *hajiyah*, dan kemaslahatan *hajiyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan *tahsiniyah*. Prinsip Penetapan Kemaslahatan Dalam mewujudkan kemaslahatan itu, Syara' menetapkan prinsip-prinsip kaidah Kuliyah. Semua yang mengandung madlarat harus di jauhi atau dihilangkan. Dalam menghindari dan menghilangkan yang mudlarat ditempuh pula prinsip-prinsip: Dalam menghilangkan yang madharat, tidak boleh dengan menempuh madharat yang sama. Dalam menghilangkan madlarat yang umum boleh ditempuh dengan madlarat yang khusus, atau yang lebih ringan. Menghindari yang mengandung kerusakan lebih diutamakan sekedar mendatangkan maslahat, karena

prinsip Hukum Islam adalah mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemaudaaaran. Pada prinsipnya, dalam mencapai kemaslahatan, segala yang mendatangkan kesulitan hidup dihilangkan.<sup>8</sup>

Berangkat kepada *legal theory* dalam menginstinbathkan hukum dijelaskan bahwasanya tujuan diturunkannya hukum yaitu untuk kemaslahatan ummat sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu Ishaq asy-Syatibi yakni untuk kemaslahatan hamba baik didunia maupun diakhirat. Pun Imam Syatibi mengatakan bahwasanya keberadaan kualitas masalah mursalah tersebut bersifat qat'i, sekalipun dalam penerapannya bersifat zanni atau relatif.

Terkait persoalan golongan putih dalam memandang persoalan kontemporer tersebut maka dapat di analisis dengan menggunakan metode masalah mursalah, diamana prinsip dalam masalah mursalah, lebih memerhatikan atau menggunakan prinsip kemaslahatan atau kemanfaatan dari suatu tindakan hukum, jika akibat dari tindakan golongan putih tersebut mendatangkan kumaslahatan, misalnya untuk menumbangkan pemerintahan yang dzalim maka tindakan golongan putih tersebut dapat dibenarkan. Namun jikalau akibat tindakan golongan putih tersebut mendatangkan kemudharatan misalnya akan berpotensi peluang pasangan calon yang memimpin tidak memenuhi kriteria seorang pemimpin baik itu *fathonah, siddiq, adil*, dan amanah, maka tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan.

### **A.Qiyas**

Secara etimologis kata “qiyas” berarti *قَدْر*, artinya mengukur membandingkan sesuatu . Sementara pengertian qiyas menurut istilah hukum (terminology) terdapat beberapa definisi yang berbeda yang saling berdekatan artinya. Namun apabila

---

<sup>8</sup> Muhammad Mushthafa al-Syalabi, Ta'lil al-Ahkam, Mesir: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah, h. 281-287.

diperhatikan unsur-unsur pokok di dalam qiyas yaitu: ashal, cabang, hukum *ashal* dan *illat*.

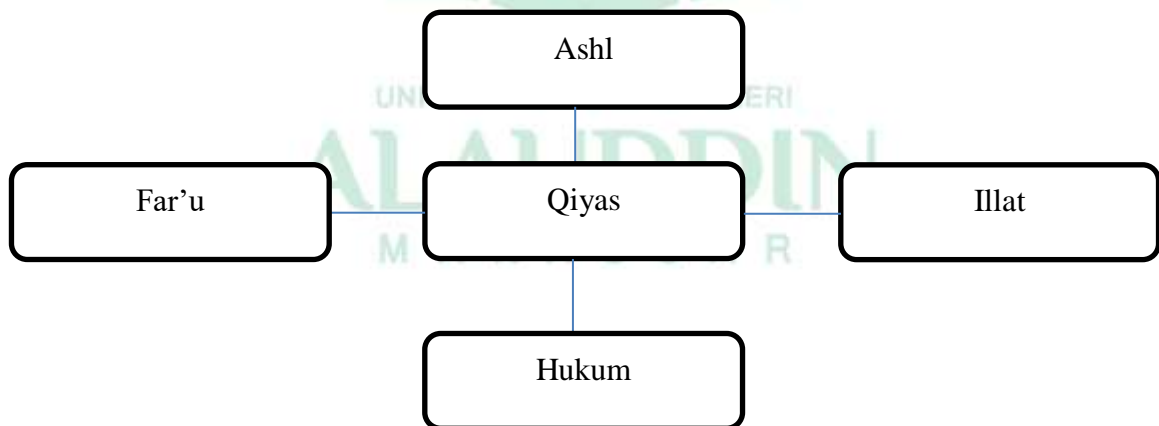
Imam Syafi'i mengatakan tentang *qiyas* sebagai berikut:

وكل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم وعليه اذا كان بعينه اتباعه واذا لم يكن فيه بعينه  
يطلب الدلالة على سبيل الحق بالاجتهاد والاجتهاد هو القياس

Terjemahan :

*“Setiap kejadian/peristiwa yang terjadi pada seorang muslim pasti ada hukumnya. Dan ia wajib mengikuti nash, apabila ada nashnya. Dan apabila tidak ada nashnya dicari dari permasalahannya (dilalah-nya) diatas jalan yang benar dengan ijtihad, dan ijtihad itu adalah qiyas”*

### Rukun dan Syarat Qiyas



Rukun atau unsur yang harus ada dalam qiyas ada empat :

### 1) *Ashal*

*Ashal* (asal) yaitu sesuatu yang di-nash-kan hukumnya yang menjadi ukuran atau tempat menyerupakan/meng-qiyas-kan di dalam istilah ushul disebut ashal (الأصل) atau maqis ‘alaih (المقيس عليه) atau musyabbah bih (المشبه به)

Ashal sebagai rukun qiyas menurut sebagian ahli ushul adalah nash-nash baik dari Al-Quran maupun al-sunnah bahkan al-ijma’ karena berbicara qiyas adalah berbicara tentang sumber pokok. Maka syarat ashal dalam qiyas adalah harus berasal dari nash al-Qur’an, al-Sunnah dan al-Ijma’.

### 2) *Far’u*

*Far’* (cabang) yaitu sesuatu yang tidak di-nash-kan hukumnya yang diserupakan atau di-qiyas-kan. Di dalam istilah ushul disebut al-far’ (الفرع) atau al-maqis (المقيس) atau *al-musyabbah* (المشبه).

Di dalam far’un (cabang) harus memenuhi syarat-syarat yakni Cabang tidak mempunyai hukum yang tersendiri, ‘Illat yang ada pada cabang harus sama dengan ‘illat yang ada pada Ashal, Cabang tidak lebih dahulu ada dari pada ashal serta Hukum cabang harus sama dengan hukum ashal.

### 3) *Illat* (العلة)

Yaitu sebab yang menyambungkan pokok dengan cabangnya, maka berbicara tentang qiyas akan lebih banyak berbicara tentang ‘illat hukum ini. ‘Illat adalah sesuatu/sifat yang ada pada ashal yang menjadi landasan/sebab adanya hukum pada cabang-cabang, atau dengan kata lain ‘illat adalah sesuatu sifat yang nyata dan tertentu yang bertalian (munasabah) dengan ada atau tidak ada hukum”, maka syarat ‘illat adalah

harus merupakan sesuatu yang nyata dalam arti dapat diamati; tanpa diketahui adanya ‘illat kita tidak bisa meng-qiyas-kan.

Argument fiqh terkait golongan putih dapat dilakukan penyelidikan terlebih dahulu dengan menggunakan metode ushul fiqh, dengan mendasar kepada *Al-Ahkam-alKhamsah* atau biasa disebut sebagai hukum taklifi ialah ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya yang berhubungan langsung dengan perbuatan mukallaf baik dalam bentuk perintah, anjuran untuk melakukan, larangan, anjuran untuk tidak melakukan, atau dalam bentuk memberi kebebasan memilih untuk berbuat atau tidak berbuat. dan didalam fiqh istilah hukum taklifi tersebut digunakan untuk menganalisis persoalan hukum apakah perbuatan dari seorang mukallaf tidak bertentangan dengan syariat Islam dan apakah tindakan hukum tersebut masuk kategori wajib, halal, haram, mubah, ataupun makruh dengan menyandarkan beberapa dalil-dalil Al-Qur'an maupun dalil-dalil hadis yang berkaitan dengan persoalan hukum dan sinkron terhadap perbuatan hukum.

Wajib	Sesuatu yang diperintahkan (diharuskan) oleh Allah dan Rasul-Nya untuk dilaksanakan oleh orang mukallaf, dan apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala dari Allah, sebaliknya apabila tidak dilaksanakan diancam dengan dosa.
Sunnah	Suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah swt. dan Rasul-Nya, dimana akan diberikan pahala orang yang melaksanakannya, namun tidak dicela orang yang tidak melaksanakannya.
Haram	Sesuatu yang dilarang oleh Allah swt. dan Rasul-Nya, dimana orang yang melanggarnya dianggap durhaka dan diancam dengan dosa,

	dan orang yang meninggalkannya akan diberi pahala oleh Allah swt.
Mubah	Sesuatu yang diberi pilih oleh syariat apakah seorang mukallaf akan melakukannya atau tidak melakukannya, dan tidak ada hubungannya dengan dosa atau pahala.
Makruh	Sesuatu yang dianjurkan syariat untuk meninggalkannya, dimana ketentuan tersebut ditinggalkan akan mendapat pujian dan apabila dilanggar tidak mendapat dosa.

Jika golongan putih disandarkan sebagai bagian dari pemilu sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah mengenai wakalah, maka pemilihan umum sebagai sesuatu yang wajib sebagai proses memilih pemimpin. Pemilu merupakan pelegitimasi dari demokrasi. Dengan adanya pemilu, diharapkan mampu menciptakan pemimpin yang berkualitas. Tetapi dalam prosesnya biasanya terjadi konflik kepentingan ada yang dilakukan oleh para pemilih misalnya dalam suatu pemilihan ada tiga calon si A memilih calon pertama si B memilih calon kedua dan si C tidak memilih kedua pasangan calon tersebut dari peristiwa tersebut si C tidak memilih siapapun dan si C dikatakan sebagai golongan putih. Pemimpin yang berkualitas bisa dilahirkan dari pemilu yang berkualitas dan pemilih yang berkualitas pula dalam konsep kenegaraan fungsi pemimpin sangat dibutuhkan karena pemimpin yang melakukan penyelenggaraan pemerintahan pemimpin mengayomi masyarakat. Terkait persoalan golongan putih, yang merupakan persoalan kontemporer.

Sikap golongan putih atau sengaja tidak melibatkan di dalam pemilu untuk memberikan suara adalah boleh dan bisa toleransi sepanjang hal itu tidak membawa



akibat pada gagalnya penyelenggaraan pemilu. Akan tetapi, jika sampai menyebabkan kegagalan dalam pemilu, yang berarti pula menyebabkan gagalnya upaya pembentukan pemerintahan, maka golongan putih seperti itu dilarang.

Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. An-Nisa/59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahan :

*“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*<sup>9</sup>

Ayat ini menjelaskan persoalan keharusan menyerahkan amanah kepada ahlinya, menghukumi orang secara adil, sesuai ketantuan yang Allah tetapkan, dan keharusan menaati Allah, Nabi dan Ulil Amri. Setelah melihat kata “Ulil Amri” dimana kata tersebut dimaknai sebagai *ulama, imam, umara'*, penguasa dan khalifah, yang diyakini bagian elemen dari apa yang disebut negara. Disisi lain, ayat tersebut memerintahkan suatu kepatuhan selain kepada Allah dan Nabi, juga kepatuhan terhadap ulil amri selama mereka berpegang pada syari'ah.

---

<sup>9</sup> Kemeneterian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jawa Timur: Halim Publishing, 2013), h.87.

Dalam khazanah yurisprudensi Islam klasik, Al-Mawardi merupakan salah satu tokoh penting dalam merumuskan teori dan konsep yang berkaitan dengan politik dan ketatanegaraan menurut Islam. Beliau adalah salah satu tokoh terkenal, Pada masterpiece-nya yang bertitel Al-Ahkam as-Sulthaniyyah, Al-Mawardi menyatakan bahwa kepemimpinan (imamah) dibentuk untuk tujuan menjaga agama dan mengatur persoalan dunia. Karena itulah, bagi al-Mawardi membentuk sebuah pemerintahan merupakan sesuatu yang wajib fardlu kifayah secara syara dan tidak hanya secara rasional.

Menurut Sudarmadji, mengharamkan umat Islam bersikap Golput dalam pemilihan pemimpin, karena dua alasan: pertama, pemilu adalah media untuk memilih pemimpin yang wajib ditaati. Dua, sikap golput itu akan merugikan umat Islam sendiri karena sama artinya membiarkan orang lain memilih pemimpin sesuai dengan keinginannya yang dapat berakibat terpilihnya pemimpin yang ditindak sesuai dengan keinginan umat Islam.

Menurut Ibnu Taimiyah, bila diyakini bahwa kebajikan bermanfaat, walaupun sebenarnya merupakan keharusan dan meninggalkannya mendatangkan kemudharatan, sementara kekejian mendatangkan kemudharatan dan di dalam hal yang tidak disukai kadang-kadang terdapat kebaikan, maka pertentangan dapat terjadi, baik antara dua kebaikan yang tidak mungkin digabungkan. Lalu dipilih kebaikan yang lebih baik, adapun pertentangan antara dua kekejian yang tidak mungkin dijauhi keduanya, akan diusahakan menyingkirkan kebajikan dan kekejian, maka tidak ada pilihan, kita harus melaksanakan kebajikan dan meninggalkan kekejian.

Tentu saja, dalam mengangkat seorang pemimpin, hal-hal yang menyangkut kemampuan, kejujuran, keadilan, perjuangan yang selalu berpihak pada pemberi

amanah merupakan prasyarat yang diperlukan. Memilih seorang pemimpin harus dilandasi dengan nilai amanah dan musyawarah untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis.

Salah satu ciri demokrasi adalah kesediaan pemimpin untuk menerima kritik, dan siap dikendalikan oleh masyarakat dalam berbagai bentuk. Sedangkan untuk golongan putih, jika memilih pemimpin s hukumnya *fardhu kifayah*,.

Dengan kata lain, *mafhum mukhalafah* dari keputusan ini adalah kebolehan tidak ikut memilih bila sebagian yang lain melaksanakannya. Maka dengan sendirinya golput termasuk perbuatan yang mubah. Lebih jauh, NU melihat memilih merupakan hak perorangan yang tak bisa dirampas begitu saja. Senada dengan NU, menurut KH. Hasyim Muzadi menyatakan bahwa golput hukumnya boleh. Karena golput berdiri di atas logikanya sendiri.<sup>14</sup> Yakni golput hadir sebagai kritik bagi mereka yang tidak dipercaya, mereka yang jenuh dengan berbagai hal terkait politik. Maka dalam hal ini, golput bagian dari kontrol yang harus dijalankan.<sup>10</sup>

Sebagaimana dapat dipahami dalam Q.S Al-Baqarah/30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا تَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahan :

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”<sup>11</sup>

<sup>10</sup><http://www.dpdimmriau.co.cc/2009/01/golput-dan-fatwa-haram.html>, Diakses 18 April 2021 Pukul 10:30

<sup>11</sup> Kemeneterian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jawa Timur: Halim Publishing, 2013), h.6.

Menurut Ibnu Katsir, Imam Al-Qurthubi dan Ulama yang lain telah menjadikan ayat ini sebagai dalilnya menegakkan khilafah untuk menyelesaikan dan memutuskan perkara pertentangan manusia, menolong orang yang teraniayah, menegakkan hukum Islam, mencegah merajalelanya kejahatan dan masalah-masalah lain yang tidak dapat terlaksananya kecuali adanya pemimpin. Sebagaimana Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Abu Hurairah :

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَكُمْ.

Terjemahannya:

*Jika tiga orang (keluar) untuk bepergian, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai ketua rombongan.” [Sahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2609).*

#### **4. Golongan Putih dalam Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Siyasah Syar’iyyah**

Dalam Islam, golput merupakan permasalahan politik yang terdapat dalam pemilu yang berkaitan dengan *siyāsah*. Pada urusan politik perlakuan Islam berbeda dengan perlakuannya terhadap urusan Aqidah dan Ibadah, karena politik sifatnya yang bisa berubah dan selaras dengan perkembangan zaman. Ketika nabi Muhammad saw wafat, ummat Islam tidak mendapatkan wasiat apapun dari Rasulullah tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik, dan tidak juga wasiat tentang bagaimana prosedur pemilihan pengganti beliau. Rasulullah menyerahkan urusan tersebut kepada kaum muslimin untuk melakukan pemilihan dengan cara musyawarah sebagaimana diajarkan oleh agama. Pada dasarnya pemilu merupakan musyawarah.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Ahmad ‘Ubaydi Hasbillah, *fatwa haram golput dalam perspektif sosiologi hukum islam*, (YUDISIA.Vol.6, No.1 Juni (2015), h.23

Pemilu merupakan media untuk membentuk pemerintah, maka hukum menyelenggarakan pemilu adalah juga *fardu kifayah*. Jika pemilu itu *fardu kifayah*, maka yang pokok adalah bagaimana pemilu itu terselenggarakan dengan sah, maka gugurlah kewajiban kifayah itu dari perspektif Islam. Sistem tatanegara islam atau Siyasah Syar'iyah mempunyai peranan yang penting dalam merumuskan serta menetapkan kebijakan politik praktis yang mampu membawa manfaat bagi umat islam termasuk didalamnya kepentingan negara.<sup>13</sup> golongan putih dalam islam merupakan salah satu permasalahan yang muncul dalam pemilu yang mempunyai keterkaitan dengan siyasah. Perlakuan Islam dalam urusan aqidah dan ibadah berbeda dengan perlakuan dalam urusan politik, ini diakibatkan karena sifat politik yang sangat dinamis.<sup>14</sup> Pada saat Rasulullah saw wafat tak satupun wasiat yang ditinggalkan mengenai siapa yang akan menggantikan posisinya sebagai pemimpin politik. Semua hal itu di serahkan kepada kaum muslimin untuk melakukan penyelesaian masalah dengan menggunakan musyawarah sebagai jalan untuk memilih penerus Rasulullah saw karena tidak ada wasiat yang ditinggalkan Rasulullah yang berkaitan dengan metode pemilihan pengganti beliau. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pemilu yang dimaksudkan dalam islam pada dasarnya adalah musyawarah.<sup>15</sup>

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu khaldun, manusia sebagai masyarakat memerlukan *al-wazi'* (pemimpin) untuk melaksanakan kekuasaan dan

---

<sup>13</sup> Ayu Andira, Fatmawati, Fenomena Kolom Kosong pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2018, *Siyasatuna: Jurnal Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2, Nomor 3, (September 2020), h.7.

<sup>14</sup> Usman Jafar, *Fiqh Siyasah Telaah atas Ajaran, Sejarah dan Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.25.

<sup>15</sup> Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, Fatwa Haram Golput dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam, *Yudisia: Jurnal Fakultas Hukum*, Volume 6, Nomor.1 ( Juni 2015), h.23

memperbaiki kehidupan masyarakat dan mencegah terjadinya perbuatan aniayah di antara sesama . Perintah tersebut dinyatakan secara tegas oleh Allah dalam al-Quran bahwa taat kepada pemimpin adalah sebuah kewajiban dengan syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya. tidak mungkin Allah akan memerintahkan umat untuk taat atau melakukan sesuatu yang tidak ada. Dari sinilah kemudian para ulama menyatakan wajib menjadikan urusan kepemimpinan ini sebagai bagian dari agama karena merupakan sarana untuk *taqarrub* kepada Allah.<sup>16</sup>

Ketentuan hukum Islam, hukum golongan putih adalah tergantung bagaimana ketentuan-ketentuan pelaksanaan pemilihan umum yang dihasilkan melalui musyawarah. Jika menurut ketentuan yang disepakati itu golput dibolehkan, maka bolehlah golput menurut Islam. Begitu juga kalau menurut ketentuan yang disepakati itu golongan putih dilarang, maka haramlah golput menurut Islam.<sup>17</sup>

Dalam kitab *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Imam al-Mawardi mengatakan bahwa kepemimpinan adalah satu tema yang bertujuan menggantikan kenabian. Fungsinya adalah menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Oleh karena itu, mengangkat pemimpin bagi orang yang tinggal dalam satu negara hukumnya wajib berdasar ijma (kesepakatan) ulama. Terkait fungsi pertama, yakni menjaga agama, maksudnya adalah memelihara keberlangsungan akidah yang fundamental, syariah yang permanen dan konsisten, dan akhlak yang memesonakan. Sedangkan terkait fungsi mengatur urusan dunia adalah ikut serta dalam memilih pemimpin dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional. Jadi memilih pemimpin itu berpahala.

---

<sup>16</sup> Usman, Kekuasaan dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Refleksi atas Pemikiran Politik Islam), *Al-Daulah: Jurnal Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 6, Nomor 2, (Desember 2017), h. 2.

<sup>17</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 867.



Alasannya, pertama, karena menjaga eksistensi kepemimpinan dalam suatu negara dan kekuasaan. Ibnu Taimiyah dalam al-Siyasah al-Syar'iyah mengatakan bahwa enam puluh tahun di bawah kepemimpinan seorang pemimpin yang zalim itu lebih baik ketimbang satu malam tanpa ada kepemimpinan.

Kedua, dengan adanya kepemimpinan, masyarakat dapat menjalankan perintah Allah SWT, bekerja, belajar. Semua aktivitas ini baru dapat dilakukan apabila negara dalam keadaan aman, tidak ada perebutan kekuasaan, dan masyarakat di level bawah tunduk terhadap pemimpin yang dipilih dengan cara yang sah berdasarkan kesepakatan bersama. Hanya saja, Nabi SAW berpesan, “Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi (jabatan) karena meminta, kamu akan ditelantarkan, dan jika kamu diberi dengan tidak meminta, kamu akan ditolong.” (HR. Bukhari dan Muslim). Yang menolong tentu adalah masyarakat yang memilihnya karena menyukainya.

Sebagaimana dalam hadist shahih yang diriwayatkan HRMuslim:

خِيَارُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ. «. قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ « لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وَلَايَتِكُمْ شَيْئًا تَكَرَّهْتُمْ فَانْكَرُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ

Terjemahannya:

*Sebaik-baik pemimpin kalian adalah kalian mencintai mereka dan mereka pun mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Sedangkan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah kalian membenci mereka dan mereka pun membenci kalian, kalian mengutuk mereka dan mereka pun mengutuk kalian.”* (HR. Muslim).

Fatwa MUI terkait penggunaan hak pilih dalam pemilu tertuang dalam buku berjudul "Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975" yang diterbitkan Erlangga. Hal itu

dijelaskan pada halaman 867 dengan bab keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Ketiga Tahun 2009. Dewan Pertimbangan MUI: Wajib Memilih, Bukan Golput Haram. Ma'ruf Amin ikut menandatangani fatwa MUI terkait penggunaan hak pilih dalam pemilu) Fatwa itu berisi lima point terkait penggunaan hak pilih dalam pemilu.<sup>18</sup>

Penggunaan hak pilih menurut MUI dalam pemilu telah tertuang dalam buku yang berjudul “Himpunan Fatwa MUI sejak 1975” yang diterbitkan erlangga. Hak pilih dijelaskan pada halaman 867 dengan bab keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia ketiga tahun 2009. Dalam fatwa tersebut terdapat lima poin yang berkaitan dengan penggunaan hak pilih dalam pemilu.<sup>19</sup>

1. Jika dilihat dari pandangan Islam memilih pemimpin haruslah memenuhi kriteria dalam islam yang sesuai dengan tuntunan agama dengan dasar untuk kemaslahatan masyarakat.
2. Pemilihan pemimpin yang sesuai dengan kriteria Islam merupakan suatu upaya guna terwujudnya cita-cita yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
3. Hukum memilih pemimpin dalam Islam adalah wajib untuk menegakkan imamah (pemimpin) atau imarah dalam kehidupan bersama
4. Pemimpin yang wajib dipilih dalam konteks islam ialah pemimpin yang mempunyai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. Serta memiliki sifat Jujur (*Siddiq*), dapat dipercaya (*Amanah*), aktif dan aspiratif (*Tabliq*), Mempunyai kemampuan dalam memperjuangkan umat islam (*Fathonah*).
5. Jika pasangan calon wakil rakyat ada yang memenuhi persyaratan sebagaimana dalam point empat lantas tidak memilihnya maka hukum

---

<sup>18</sup> Rapung Samuddin, *.Fiqh Demokrasi* (Jakarta:Gozian Press), h. 304.

<sup>19</sup> Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi*, h. 305.



golongan putih adalah Haram.

Dalam fatwa MUI juga terdapat rekomendasi mengenai pemimpin yang harus dipilih yaitu; pertama, umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang sesuai dengan kriteria agama dalam mengemban tugas *amar ma'ruf nahimunkar*. Kedua, pemerintah dan penyelenggara pemilu dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dengan melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu agar partisipasi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.



## BAB V

### PENUTUP

#### **A. Kesimpulan**

1. Golongan Putih jika dikaitkan dengan Demokrasi sangat berhubungan sebab Demokrasi merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang terjewantahkan melalui Pemilihan umum. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum sebagai bentuk keberhasilan Demokrasi. Pemimpin yang berkualitas bisa dilahirkan dari pemilu yang berkualitas dan pemilih yang berkualitas pula, dalam konsep kenegaraan fungsi pemimpin sangat dibutuhkan karena pemimpin yang melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pemimpin yang mengayomi masyarakat. Sikap golongan putih atau sengaja tidak melibatkan diri dalam pemilu adalah boleh dan bisa toleransi sepanjang hal itu tidak membawa akibat pada gagalnya penyelenggaraan pemilu. Akan tetapi, jika sampai menyebabkan kegagalan dalam pemilu, yang berarti pula menyebabkan gagalnya upaya pembentukan pemerintahan, maka golongan putih seperti itu dilarang.
2. Hubungan Agama dan Pemilu saling berhubungan sebab, Agama mengakui adanya hak pilih dan hak untuk memilih. Dalam agama memilih pemimpin adalah bentuk instrument dalam demokrasi atau *syura*. Dalam agama pun pemilu dikenal dengan istilah *waklah* yang esensinya sama dengan pemilu yaitu suatu proses penyerahan kekuasaan kepada orang lain untuk mewakilnya, supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (*annaqbalu anniyabah*) dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan

pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.

3. Untuk menganalisis persoalan golongan putih dengan menggunakan analisis metode fiqh sebagai pisau bedah dalam kasus tersebut, maka penulis menggunakan pisau analisis analisis masalah mursalah, yang mana masalah mursalah merupakan salah satu metode penetapan hukum Islam yang menjunjung tinggi kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Memilih ataupun tidaknya pasangan calon tergantung dari akibat yang timbul dari tindakan golongan putih tersebut apabila golput yang dilakukan mendatangkan kemudharatan, seperti halnya menutup peluang pemimpin yang sesuai dengan tuntutan agama seperti *fathonah*, *siddiq*, amanah dan *tablig* untuk menjadi pemimpin, maka tindakan golongan putih tersebut tidak dibenarkan.

#### ***B. Implikasi Penelitian***

1. Untuk mengurangi angka golongan putih dalam pemilihan umum, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjalankan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat akan pentingnya pemberian suara dalam pemilihan umum.
2. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih. KPU dapat bekerja sama dengan Karang Taruna di tiap desa dengan menyiapkan seluruh informasi terkait pemilu dan pilkada, seperti mempersiapkan alat peraga yang akan ditemui pelajar pada saat pemilihan. Memberi pemahaman kepada masyarakat melalui *website* atau pentingnya pemberian suara dalam pemilihan umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Novel, *Peradaban Komunikasi Politik* Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 1999.
- Asfar Muhammad, *Presiden Golput*, Surabaya: Jawa Pos Press, 2004.
- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syari'ah; Suatu Pengenalan Umum*, Tazkia Institue, Jakarta, 1999.
- An-Nabhani Taqiyuddin, at-Taklil al-Hizbi, edisi Indonesia: terjemahan oleh, M. shiddiqi, *Pembentukan Partai Politik Islam*, cet II, (Bogor: Pustaka Thariqul Izza, 2002
- Al-Qur'an Surat Al-Kahfi ayat 19, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, Al-Quran dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2012.
- Brownli Ian, *Dokumen-Dokumen Mengenai Hak Asasi Manusia* jakarta: Universitas Indonesia, 1993.
- Budiarjo Miriam, *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi parlementer dan demokrasi Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1996.
- Budiarjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Burhan Wirman, *Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017.
- Donald Albert Rumukoy, Frans Maramis *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Habboddin, Muhtar, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia* Malang : UB Press, 2016.
- Huda, Ni'matul *Hukum Tata Negara Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Huda, Ni'matul, *Ilmu Negara* Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Huda, Ni'matul, M. Imam, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia* PT Fajar Inter Pretama Mandiri, 2017.

- Karim Helmi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Kashiko Tim, *Kamus Arab-Indonesia*, Kashiko, 2000.
- Kamil Sukran, *Islam & Demokrasi*, Jakarta: Gaya Media Pratam, 2002.
- Khairuman Badri, dkk, *Islam dan Demokrasi Mengungkap Fenomena Golput*, Jakarta: PT Nimas Multima, 2004.
- Manan, Bagir *Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, Bandar Lampung: FH UNILA, 1996.
- Mas'ood Mochtar, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- MD Mahfud *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- MD Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia* Jakarta : Rajawali Pers, 2017.
- Miri Djamaluddin, *Ahkamul Fuqaha': Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mjktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2004* Surabaya: LTNU Jatim dan Khalista, 2007.
- Muladi, *Politik Kewarganegaraan: Landasan Redemokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2009
- Pulungan Suyuthi , *Fiqh Siyasah: Agama, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rahmiati, *Terampil Menulis Karya Ilmiah* Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Ridwan, *Fiqh Politik* Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019.
- Rahmawati Halim dan Muhlin Lalongan, *Partisipasi Politik Masyarakat Teori dan Praktik* Makassar: CV Sah Media, 2016.
- Roso Prajoko, *Komunikasi Politik dan Perilaku Golput* Jawa Tengah: Lakeisha, 2019.
- Soeroso, R *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Soekanto Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Rajawali Pers, cetakan ke lima 2004.
- Syafi'i Antonio Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2008.

S Irfan. Awws, *Golput Haram, Haram Tidak Golput, Risalah Mujahiddin*, Edisi 27 th.Ke-III Februari 2009.

Rapung Samuddin, *.Fiqh Demokrasi* Jakarta:Gozian Press, 2014.

Tajuddin, “*partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah,*” (Tangerang: UNPAM,) Vol 3 Maret 2016.

Wijayanti Ratna, “*Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentang Produk HalalMetode Istinbath dan Ijtihad dalam menetapkan Hukum Produk Halal,*” Jawa Tengah : Universitas Sains Al-Qur’an. Vol.20, No 2. 2018.

### **Undang-Undang**

Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang “Hak Asasi Manusia”

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

### **SKRIPSI**

Handayani, Nunuk. *Fenomena Golput dalam Pemilihan Bupati Tuban Tahun 2006 dalam Perspektif Politik Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Hidayat, Dian. *Fenomena Kotak Kosong dalam Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2018 Perspektif Siyasah Syar’iyyah*, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.

Setiwati, Elli. *Analisis hukum Islam mengenai golongan putih dalam pemilihan daerah menurut perspektif majelis ulama Indonesia Lampung* . Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Zulfadli, “Golput dalam Memilih Pemimpin Menurut Fatwa MUI Tahun 2009 dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” Skripsi:UIN Ar-Raniry:2018.

### **JURNAL**

Fatmawati, Ayu Andira. *Fenomena Kolom Kosong pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2018, Siyasatuna: Jurnal Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2, Nomor 3, (September 2020).

Haerul, Miftahul Fauzy, Halimah B. *Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Makassar, Siyasatuna: Jurnal Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume, 1 Nomor 1, (November 2019).



- Hasbillah, Ahmad Ubaydi. Fatwa Haram Golput dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam, *Yudisia: Vouleme* 6, Nomor 1 (Juni 2015).
- Sastrawati, Nila. Partisipasi Politik dalam Konsep Teori Pilihan Rasional James S Coleman *Al-Risalah: Jurnal Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum* , Volume 19, Nomor 2, (November 2019).
- B, Halimah. Kepimpinan Politik Perempuan dalam Pemikiran Musaffir, *Al-Daulah: Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah dan Hukum* Volume 7, Nomor 1, (Juni 2018).
- Natsir, Andi Fadli. Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia, *Al-Risalah: Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah dan hukum* Volume 19, Nomor 1 (Mei 2019).
- Islamiyah, Ahkam Jayadi. Eksistensi Bawaslu dalam Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif DPRD Tahun 2019 dari Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, *Aldev: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2, Nomor 2, (Agustus 2020).
- Kurniati, Sistem Politik Demokrasi dalam Bias Hegemoni Negara, *Al-Daulah: Jurnal Ilmiah Syariah dan Hukum* Volume 7, Nomor 2, (2 Desember 2018).
- Mayapada, Andi Nur, Nila Sastrawati. Golput dan Kewajiban Memilih Pemimpin dalam Islam, *Siyasatuna: Jurnal Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum* Volume 2, Nomor 3, (September 2020).
- Megawati, Andi Tenri Padang. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi pemilu, *Siyasatuna: Jurnal Hukum Tatanegara Fakulta Syariah dan Hukum* Volume 2, Nomor 3, (September 2017).
- HL, Rahmatiah. Money Politic pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa, *Al-Daulah: Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah dan Hukum* Volume 3, Nomor 2, (Desember 2014).
- Kusnadi, Umar, Pasal Imunitas Undang-Undang „Corona“ dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negera, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2, Nomor 1, (Juni 2020).
- Syraif, Muhammad Ihsyan, Andi Safriani. Pemenuhan Hak Memilih Penyandang Disabilitas pada Pemilu di Indonesia, *Aldev: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* Volume 1, Nomor 3, (November 2019).
- Usman, Kekuasaan dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam Refleksi atas Pemikiran Politik Islam, *Al-Daulah: Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 6, Nomor 2, (Desember 2017).

Nasrullah, “*Majelis Ulama Indonesia (MUI) Studi atas Penggunaan Metodologi Qiyas sebagai Penetapan Hukum Islam di Indonesia*” Riau:STAI Auliaurasyidin Tembilahan, Vol. 16. No.2, Juli Desember 2017.

Ubaydi Hasbillah Ahmad, *fatwa haram golput dalam perspektif sosiologi hukum islam*, YUDISIA. Jakarta : Institut PTIQ Jakarta, Vol.6, No.1 Juni 2015.

Usman, “ *Pilkada dan Konflik Horizontal (Telaah atas Pemilukada di Kota Makassar)*,” Makassar: UIN Alauddin Makassar, Vol.7, No. 2 Desember 2018.

Wijayanti Ratna, “*Kaidah Fiqh, dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath dan Ijtihad dalam Menetapkan Hukum Produk Halal*,” Jawa Tengah: Universitas Sains Al-Qur’an” Vol.20, No. 2 2018.

#### **WEBSITE**

<http://www.dpdimmriau.co.cc/2009/01/golput-dan-fatwa-haram.html>,

<http://bekasi.muhammadiyah.or.id/artikel-memilih-pemimpin-berkualitas-dengan-pemilu-yang-berintegritas-detail-997.html>





## RIWAYAT HIDUP



A. Indraerawati lahir di Kabupaten Enrekang, Kecamatan Enrekang, pada tanggal 27 November 1998. Penulis Merupakan anak dari pasangan Andi Sadda dan Hanisa. Penulis mengawali pendidikan di SDN 26 Massemba Tahun 2005 hingga Tahun 2011. Kemudian melanjutkan Pendidikan di SMPN 2 Enrekang pada tahun 2011 dan menyelesaikan pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan Pendidikan di SMAN 2 Enrekang pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2017 semasa SMA penulis tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Devisi Kesehatan dan Gizi berbasis Sumber gizi SMAN 2 Enrekang dan Sebagai Duta Pengawas Pemilu pada Tahun 2016 di Kabupaten Enrekang. Setelah lulus penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2017 dan mengambil program studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum. Semasa kuliah penyusun aktif dalam kegiatan Organisasi dan Akademik. Tercatat pengalaman organisasi penyusun yakni menjabat sebagai Sekjen Alauddin Debate Association Pada Tahun 2019-2020. Penyusun juga aktif dalam kegiatan Lomba Debat baik tingkat Regional maupun tingkat nasional. Penulis juga pernah menjuarai lomba Essai tingkat Nasional di UMMA pada Tahun 2020.